



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TAHUN 2021-2026



**KAPUAS HULU 2021-2026
DISKOMINFO & STATISTIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah- Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 mengacu kepada visi dan misi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yaitu *"Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil"*. Visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai landasan dasar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan langkah strategis dalam mengelola bidang urusan komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik yang terkait dengan Misi ke 4 (Empat) yaitu *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas"*

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu khususnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Tuhan YME melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam berupaya mewujudkan visinya.

Putussibau Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu



Ir. STIWA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 PENDAHULUAN.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMABARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	18
 BAB III PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	21
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu....	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	24
3.5 Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.....	30
4.1 Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	30
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	32
5.1 Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.....	32
5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.....	33
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAANA TAHUN 2021-2026.....	34
6.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Wajib Dinas Komunikasi dan Informasi.....	34
6.2 Program, Kegiatan dan Pendanaan Rutin atau Oprasional	45
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.....	57
7.2 Kinerja Bidang Urusan Wajib Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.....	58
7.3 Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.....	68
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
2.1	Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin	14
2.2	Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Golongan Pangkat	14
2.3	Aparatur Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	15
2.5	Target dan Realisasi Indkator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	17
2.6	Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	20
3.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indkator RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026 Berkaitan Dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	23
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2021 – 2026	31
5.1	Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026	32
5.2	Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026	33
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Wajib Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024	35
6.2	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021– 2026	45
7.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	59
7.2	Rencana Kinerja Bidang Urusan Wajib Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026	60
7.3	Rencana Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026	69

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.1	Proses Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	3
1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Prencanaan dengan Penganggaran	4
1.3	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Misi Renstra Diskominfo dan Statistik Tahun 2021 - 2026	5
1.4	Keterkaitan Misi Renstra Diskominfo Prov Kalbar dengan Misi Renstra Diskominfo dan Statistik Tahun 2021-2026	5
1.5	Keterkaitan Misi Kementerian Kominfo, Misi Diskominfo Prov Kalbar dan Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Misi Renstra Diskominfo Tahun 2021 – 2026	6
1.6	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	13

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data Statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Bedasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang keempat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

1.1.1 Pengertian Renstra

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan atau OPD. Dalam rencana strategis tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan (OPD) Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi yang berisikan rencana strategis 5 (lima) tahun, sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (renja) OPD dan sebagai acuan bagi stakeholder di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra OPD

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu *“Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”*.

Dalam Visi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan mendukung pada Misi 4 (empat) yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”*

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 yang menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

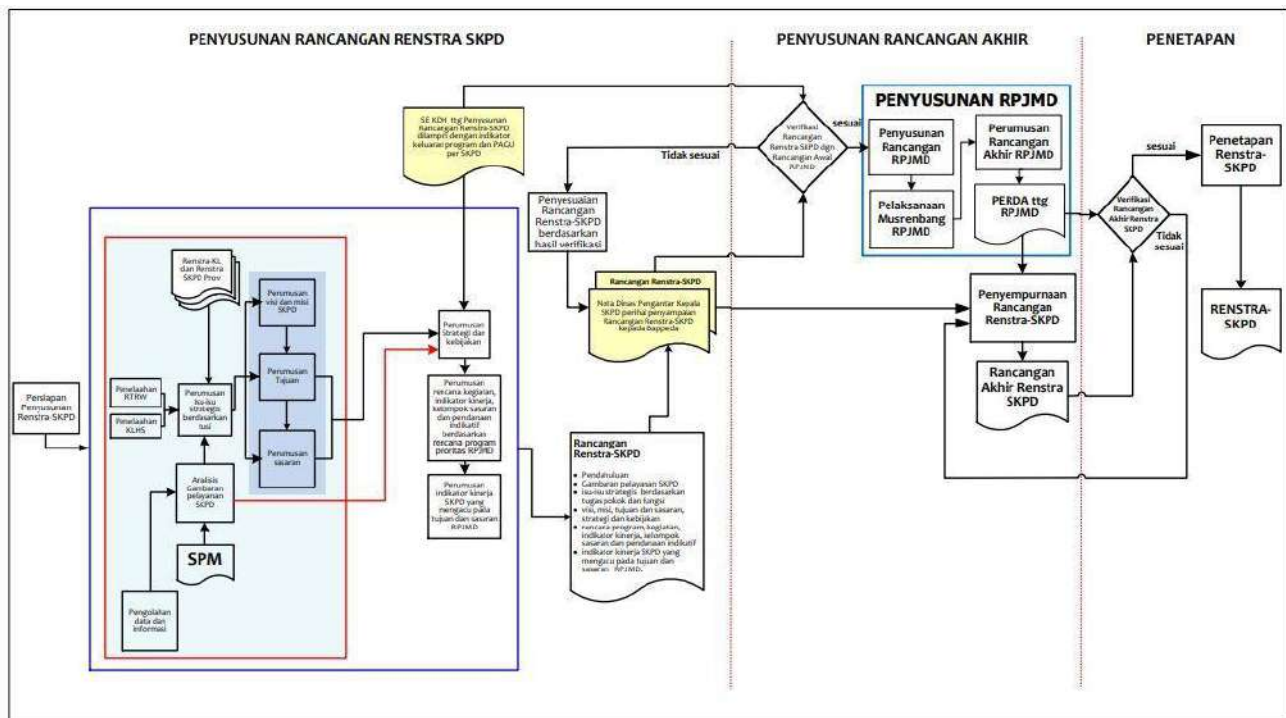
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 diawali dengan proses awal dengan pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2544/BAPPEDA/P3-B tanggal 25 Oktober 2021 untuk Melaksanakan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026.

Tim penyusunan Renstra ini, dibentuk untuk menyusun rancangan awal Renstras Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 dengan susunan tim terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlampir.

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 diawali dengan persiapan penyusunan Renstra OPD dengan melaksanakan penelaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS selanjutnya melakukan perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi serta melakukan analisis terhadap gambaran pelayanan OPD dengan membandingkan hasil SPM, selanjutnya melaksanakan perumusan Visi dan Misi OPD dan perumusan tujuan serta sasaran kinerja di Diskominfo dan Statistik sehingga menjadi rancangan Renstra OPD. Penyusunan rancangan akhir dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2021 – 2026 disempurnakan dan menjadi rancangan akhir Renstra OPD. Selanjutnya dari rancangan akhir Renstra OPD di lakukan verifikasi terhadap dan dilakukan penetapan Renstra OPD dan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2021 – 2026. Untuk melihat lebih jelas dalam proses penyusunan rencana strategis dari rancangan Renstra OPD menjadi Renstra SKPD, dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar. 1.1



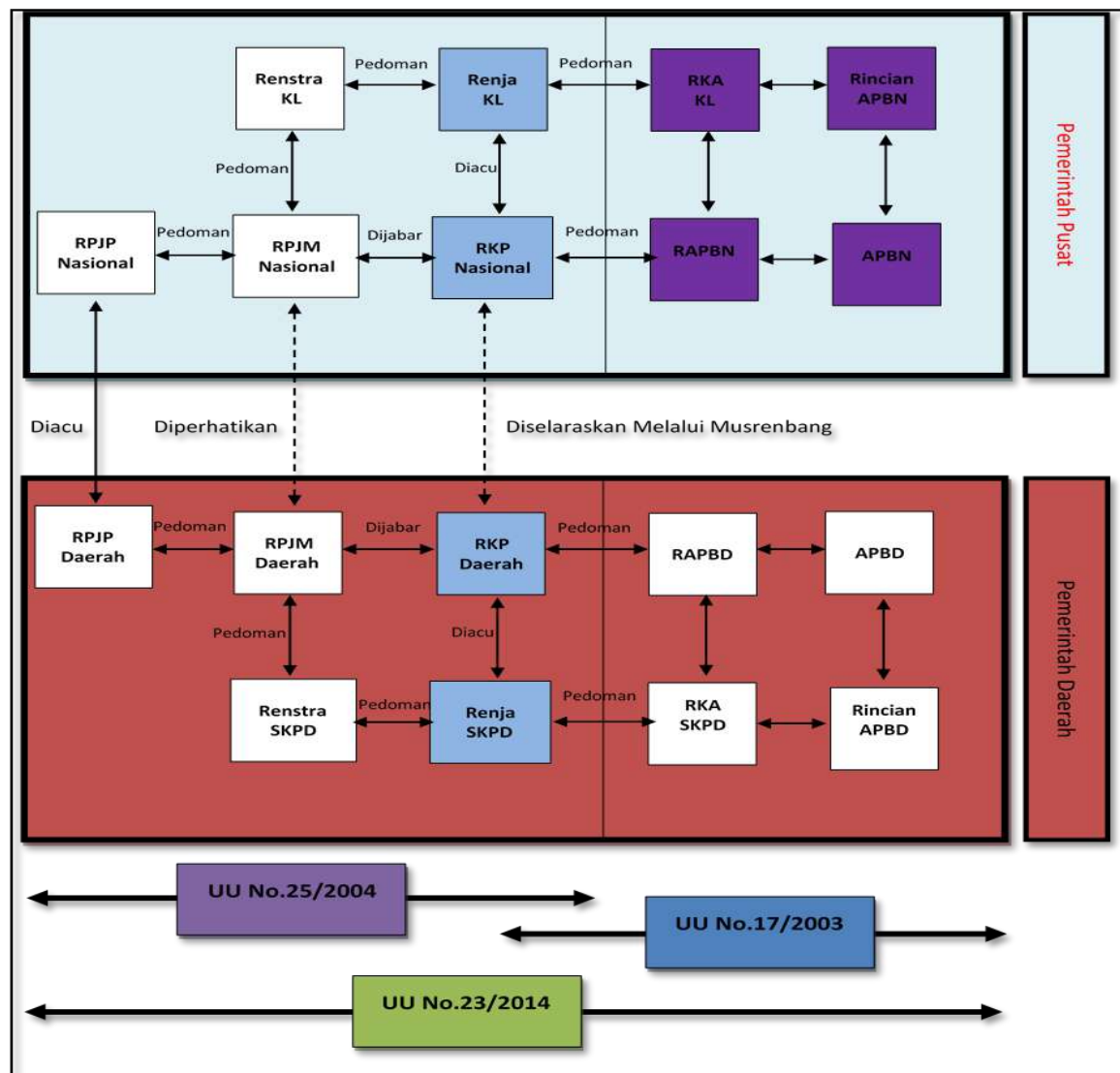
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dalam proses penyusunan rancangan Renstra Diskominfo dan Statistik Tahun 2021 – 2026, berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan Peraturan perundangan – undangan yang terkait, kebijakan pemerintahan yang terkait serta dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, RTRW Kabupaten, Renstra Diskominfo Propinsi, RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu RTRW Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil evaluasi Renstra OPD periode lalu.

Rancangan Renstra yang telah dibuat Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu kepada JP dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaiman tergambar dalam gambar 1.2 dibawah ini.

Keterkaitan rancangan renstra ini, terhadap dokumen merupakan satu keharusan dalam menyusun renstra Diskominfo dan Statistik tahun 2021 – 2026 kerana dokumen renstra ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RKA OPD untuk priode 5 (lima) tahun kedepan.

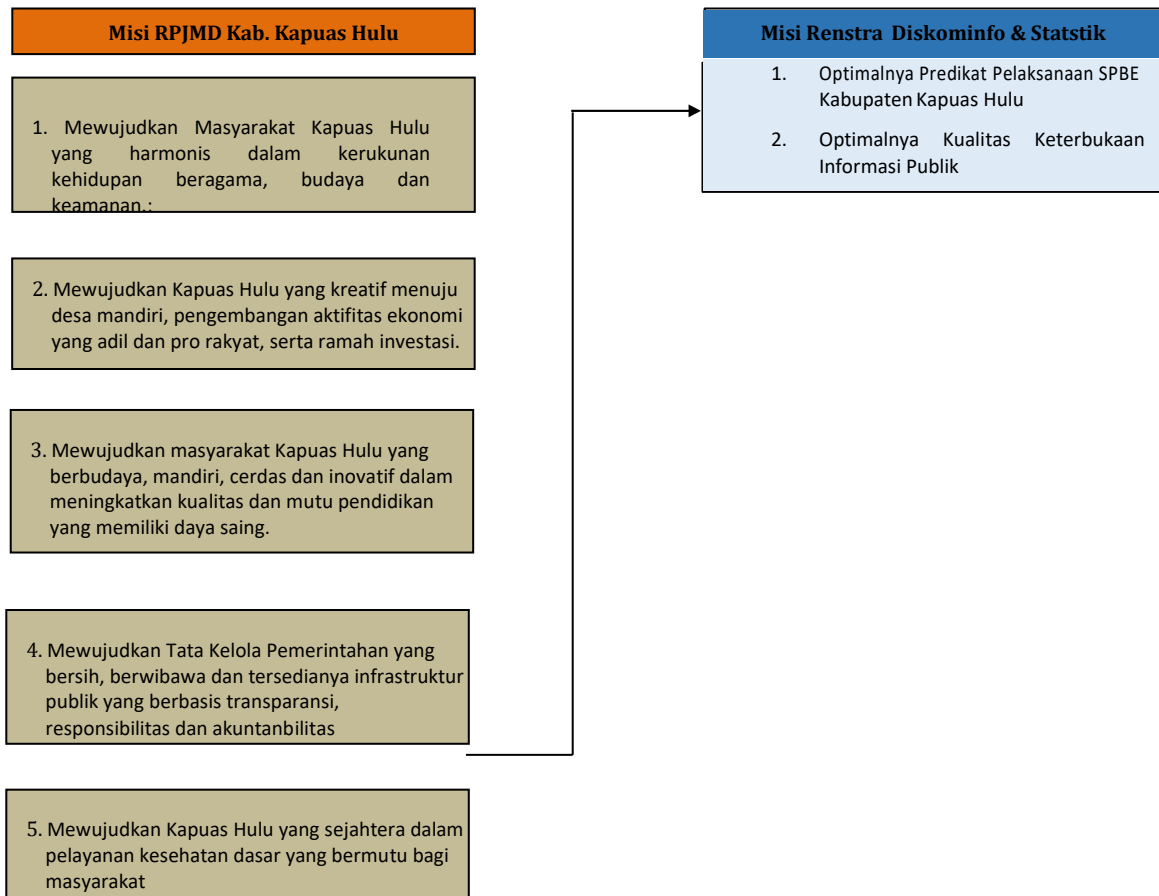
Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran



Sumber : RPJMD Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

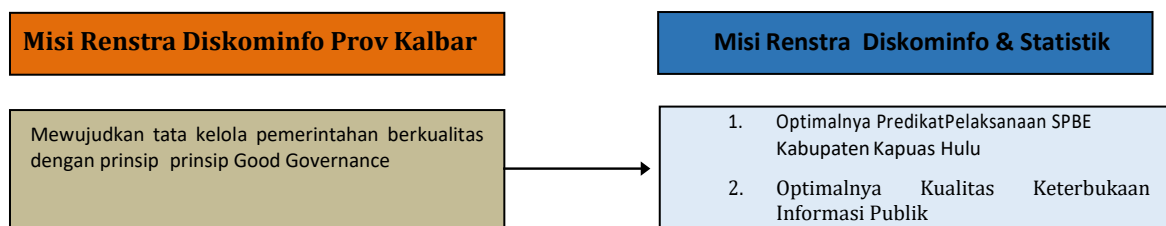
Keterkaitan dalam penyusunan rancangan renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 yang mengacu kepada misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu pada misi ke 7 (tujuh) yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar. 1.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Misi Renstra
Diskominfo dan Statistik Tahun 2021 - 2026



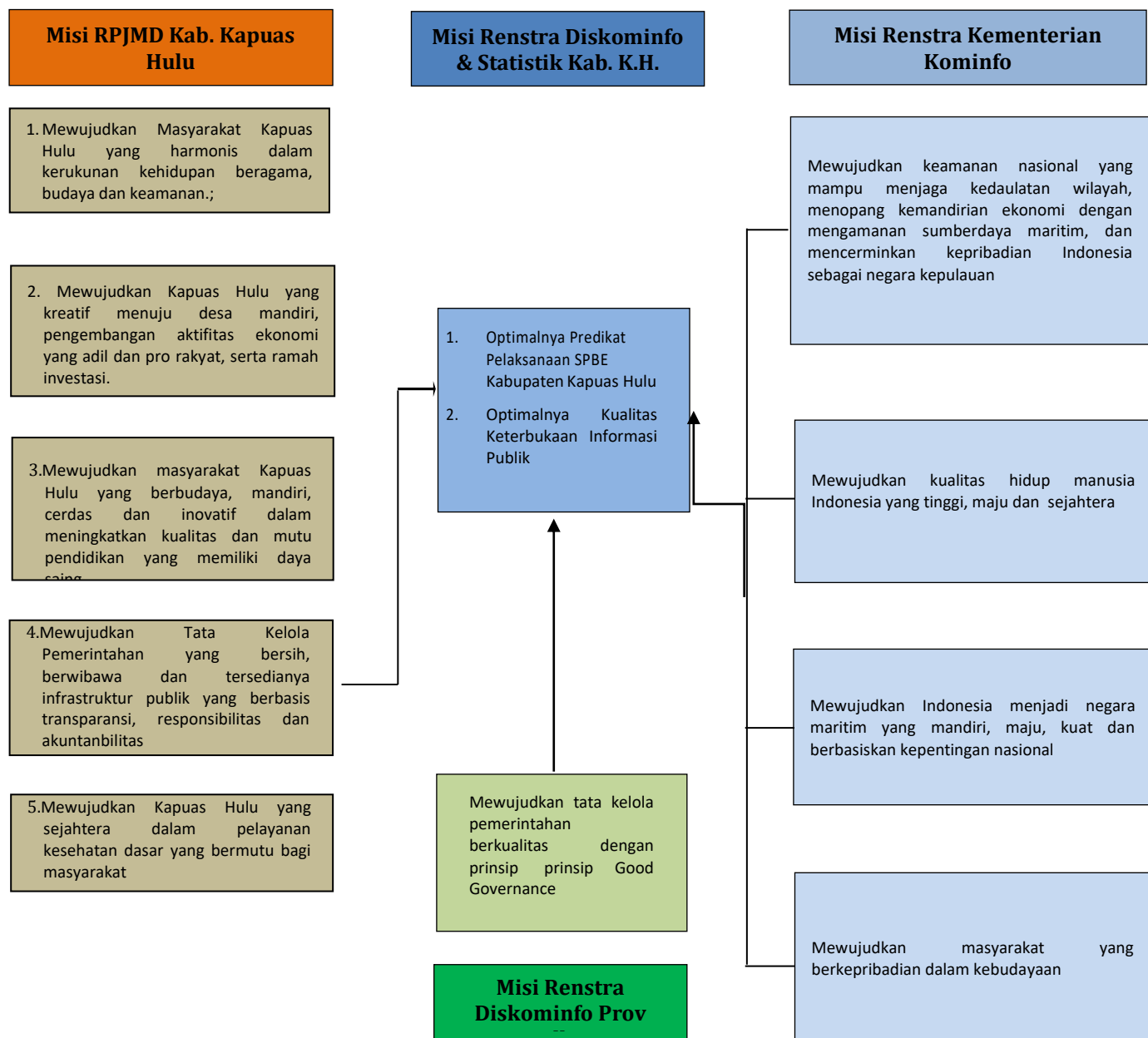
Selain keterkaitan Renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu juga menyelaraskan misi yang di miliki oleh Diskominfo Kalbar, hal ini dilakukan agar rancangan renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di selaras dengan misi yang emban oleh Diskominfo Propinsi Kalbar sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut.

Gambar. 1.4
Keterkaitan Misi Renstra Diskominfo Prov Kalbar dengan
Misi Renstra Diskominfo dan Statistik
Tahun 2021 - 2026



Dalam menyusun Renstra Renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang memiliki misi yang berkaitan dengan misi Renstra Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 4 (empat) misi sebagaimana dapat dilihat pada table. 1.5 dibawah ini.

Gambar. 1.5
Keterkaitan Misi Kementerian Kominfo, Misi Diskominfo Prov Kalbar dan
Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Misi Renstra
Diskominfo Tahun 2021 – 2026



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2021 - 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pengelolaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 - 2026. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau gagasan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 -2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPd, RENJA Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada

rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehinggamendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN
	Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
BAB III FUNGSI	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
	Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini berisikan, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Bab bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Bab bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran JMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran JMD.
BAB VIII	PENUTUP
	Bab berisi tentang penutup Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 60 Tahun 2016 Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada uraian berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik ;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
4. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi informatika dan Statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi , Informatika, dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikasi , Informatika, Statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
2. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan instansi lainnya;
3. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik ;
4. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dengan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan Daerah Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :

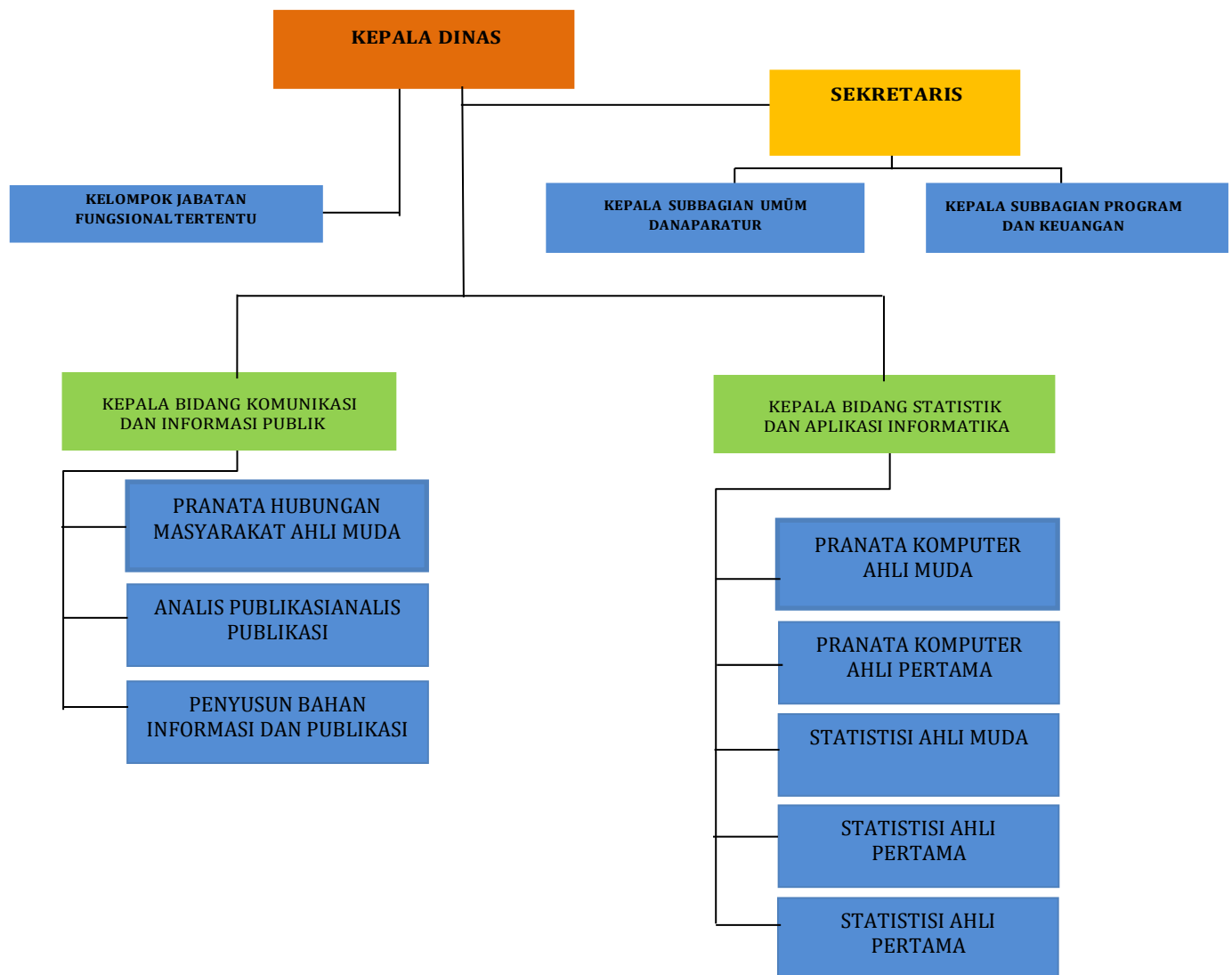
1. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. penyusunan rencana program dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
5. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
6. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik;
7. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
3. pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral;
4. pelaksanaan program penyelenggaraan aplikasi informatika;
5. pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
6. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik;
7. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.;

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Gambar. 1.6
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Bag. Organisasi Setda Kabupaten Kapuas Hulu

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu perlu didukung dengan sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat di kelompokkan mejadi dua bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia atau Aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 32 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Dari keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa waktu 2017 – 2020, untuk lebih jelas melihat perkembangan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah ini.

Tabel. 2.1
Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	1	6
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	1	3	4
3	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	4	1	5
4	Tenaga Kontrak	10	8	18
Jumlah		20	13	33

Sumber : Data Olahan

Aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat dari jumlah golongan kepangkatan pada tingkatan golongan III sebanyak 10 orang ini menunjukan bahwa sebagian besar aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang urusan komunikasi, Informatika dan Statistik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 2 di bawah ini.

Tabel.2.2
Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Unit Kerja	Golongan				Jlh
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat	3	2	1	-	6
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	1	3	-	-	4
3	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	1	4	-	-	5
4	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-
Jumlah		5	10	1	-	15

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkatan pendidikan aparatur di Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terdapat sebanyak 15 orang yang memiliki latar belakang pendidikan S2 sampai dengan SLTA, ini menunjukan bahwa sumber daya apartur yang di miliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, untuk melihat perkembangan jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel. 3 di bawah ini.

Tabel. 2.3
Aparatur Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jlh
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	2	2	1	1	-	-	6
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	1	2	1	-	-	-	4
3	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	-	5	-	-	-	-	5
4	Tenaga Kontrak	-	4	6	8	-	-	18
Jumlah		3	14	8	9	-	-	33

Sumber : Data Olahan

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 100 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2017 – 2020 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel. 5 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	2	1	1	Rusak Berat
2	Kendaraan Dinas (Motor)	11	2	9	Rusak Berat
3	Studio Radio RASIKA	1	-	1	Rusak Berat
4	Kamera Foto	3	2	1	Rusak Berat
5	Komputer	21	15	6	Rusak Berat
6	Handycam	4	1	3	Rusak Berat
7	Laptop	19	17	2	Rusak Berat
8	Genset	1	1	-	Baik
9	AC	7	7	-	Baik
10	Website	1	1	-	Baik
11	Televisi	4	2	2	Rusak Berat
12	Exciter	3	-	3	Rusak Berat
13	Projektor	2	1	1	Rusak Berat
14	Printer	14	10	4	Rusak Berat
15	Mesin Absen	1	1	-	Baik

16	Tangga	1	1	-	Baik
17	Alat pemadam kebakaran	3	3	-	Baik
18	Speker	1	1	-	Baik
Jumlah		100	Unit		

Sumber : Data Olahan

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 100 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2017 – 2020 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel. 5 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	2	1	1	Rusak Berat
2	Kendaraan Dinas (Motor)	11	2	9	Rusak Berat
3	Studio Radio RASIKA	1	-	1	Rusak Berat
4	Kamera Foto	3	2	1	Rusak Berat
5	Komputer	21	15	6	Rusak Berat
6	Handycam	4	1	3	Rusak Berat
7	Laptop	19	17	2	Rusak Berat
8	Genset	1	1	-	Baik
9	AC	7	7	-	Baik
10	Website	1	1	-	Baik
11	Televisi	4	2	2	Rusak Berat
12	Exciter	3	-	3	Rusak Berat
13	Projektor	2	1	1	Rusak Berat
14	Printer	14	10	4	Rusak Berat
15	Mesin Absen	1	1	-	Baik
16	Tangga	1	1	-	Baik
17	Alat pemadam kebakaran	3	3	-	Baik
18	Speker	1	1	-	Baik
Jumlah		100	Unit		

Sumber : Data Olahan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dengan kinerja pada urusan bidang komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik yang merupakan bagian dari misi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2020 pada Misi ke 1 (satu) “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih”.

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019 – 2020 capaian kinerja indikator sasaran di bidang urusan komunikasi dan informatika dan bidang urusan statistik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel. 5 sebagai berikut

Tabel. 2.5
Target dan Realisasi Indkator Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019 - 2020

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Tahun Target dan Realisasi					
					2019			2020		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	100%	BB	BB	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indeks SPBE	1.93	2.60	2.60	100%	2.60	2.60	100%
3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	---	75	77	100%	80	81.83	100%
4		Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Olahan RPJMD 2019 – 2020

Kinerja pelayanan Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 – 2020 dengan pengembangan pelayanan komunikasi dan informatika dan statistik dengan isu strategis tersebut dapat terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan perhitungan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. *Predikat Sakip*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2018 dengan Predikat BB
2. *Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu*, dengan perhitungan pada kondisi awal Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah 1,93 dengan predikat cukup, sedangkan pada Tahun 2019 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang

ditargetkan adalah Nilai Indeks 2,60 dengan predikat baik dapat terpenuhi 100% dan pada Tahun 2019, Tahun 2020 Target Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2,60 dengan predikat baik terpenuhi 100%.

3. *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2017 dengan jumlah 293 pengaduan masyarakat per tahun atau 80,50% dari jumlah 365 pengaduan masyarakat pertahun, target peningkatan pertahun dengan target JMD Tahun 2017 sebesar 6% atau 22 laporan pengaduan masyarakat, Tahun 2018 target sebesar 6.50% atau 24 Laporan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan Tahun 2019 target sebesar 7% atau 26 laporan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.
4. Persentase kompilasi ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu dengan kondisi awal tahun 2017 adalah 100%. Target 2018-2021 adalah 100% pertahun. Data berasal dari 26 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Peran strategis Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan 2021 – 2026 tidak terlepas dari pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian yang dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tantangan dan peluang yang harus di hadapi oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari tantangan dalam lingkup strategis Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

A. Peluang

1. Transformasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan perubahan pada tata kelola dan pelayanan untuk mendukung pencapaian visi dan strategi pembangunan nasional secara keseluruhan serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Memberikan layanan digital agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, disamping itu juga untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan edukasi publik berkualitas tinggi, program sosial dengan target yang jelas, peningkatan keamanan dan pencegahan kejahatan, respon cepat terhadap epidemi, dan peningkatan efisiensi di berbagai layanan lainnya
3. Menciptakan ekosistem media yang sehat, berprinsip *fair playing field* dengan adanya media baru dalam bentuk platform digital.
4. Mengakselerasi penerapan SPBE yang terpadu, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan adaptif.
5. Perbatasan antar negara yang berada diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdampak pada wawasan masyarakat yang bersifat global.
6. Masih rendahnya pengaruh negative (konten negative) dari kemudahan memperoleh informasi di era globalisasi karena akses telekomunikasi (internet) yang belum merata diwilayah Kapuas Hulu.

B. Tantangan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Perlu komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Data bersifat silo atau belum terintegrasi sehingga akses data menjadi sulit ketika dibutuhkan untuk intervensi publik, standar data masih lemah sehingga berpengaruh terhadap proses bagi pakai data, dan kemampuan SDM yang terbatas berkaitan dengan transformasi digital.
4. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
5. Adanya potensi kesenjangan dimasyarakat, utamanya bagi yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan akses internet.
6. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik
7. Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan antar negara yang memiliki dampak positif dan negative, diantaranya disparitas informasi masyarakat perbatasan terhadap informasi kebijakan lokal dan nasional;
8. Minimnya literasi media dan informasi yang disebabkan keterbatasan akses telekomunikasi.

Tabel. 2.6
Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya 2. Memberikan layanan digital agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 3. Menciptakan ekosistem media yang sehat. 4. Perbatasan antar negara yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdampak pada wawasan masyarakat yang bersifat global. 5. Masih rendahnya pengaruh negative (konten negative) dari kemudahan memperoleh informasi di era globalisasi karena akses telekomunikasi (internet) yang belum merata di wilayah Kapuas Hulu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Transformation dalam pemerintahan, menuju digital Government yang transparan, efisien partisipatif kolaboratif, berkelanjutan dan efektif. 2. Penerapan pelaksanaan SPBE secara optimal. 3. Aplikasi e-government di Instansi pemerintah tersebar dan beragam, data tidak terintegrasi 4. Infrastruktur IT yang masih belum memadai. 5. Terdapat banyak desa yang belum terjangkau layanan jaringan telekomunikasi (<i>blankspot</i>) dan jaringan akses internet. 6. Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan antar negara yang memiliki dampak positif dan negative, diantaranya disparitas informasi masyarakat perbatasan terhadap informasi kebijakan lokal dan nasional. 7. Minimnya literasi media dan informasi yang disebabkan keterbatasan akses telekomunikasi.

BAB III
PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam pengelolaan pelayanan di Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terdapat permasalahan yang harus di hadapi yang di kelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi di masing – masing bidang urusan di lingkup Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rencana strategis Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, permasalahan yang mendasar di Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal.
2. Belum optimalnya penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu.
3. Belum terpenuhinya SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki kompetensi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE.
4. Belum tersedianya infrastruktur data center maupun jaringan intranet antar organisasi perangkat daerah yang mampu mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (e-Government) dalam urusan pemerintahan di pemerintah daerah.
6. Pembangunan aplikasi dengan platform dan struktur berbeda serta dilakukan oleh masing-masing OPD.
7. Masih banyak wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi (*blankspot*).
8. Sarana dan prasarana insfrastruktur TIK yang belum memadai.
9. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal
10. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian
11. Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat secara online
12. Kurang produktifnya KIM (kelompok informasi masyarakat) yang telah terbentuk
13. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) komunikasi guna melaksanakan strategi komunikasi;
14. Belum optimalnya partisipasi perangkat daerah dalam pengelolaan berita daerah melalui portal berita bersama;
15. Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi di wilayah kecamatan dan desa.

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kapuas Hulu adalah *"Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil"*. Visi tersebut dijabarkan seperti di bawah ini, yaitu:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan ;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Visi dan misi jangka menengah tersebut didesain akan dicapai melalui enam periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 sendiri merupakan pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari misi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 yaitu pada Misi ke 4 (Empat) *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”*.

Sesuai RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 pada misi ke 4 (Empat) urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan Statistik dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kinerja dan sasaran yang diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel. 3.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 -2026
Berkaitan Dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021- 2026			
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Optimalnya Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat
	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat

Sumber : Data Olahan JMD 2021 - 2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Visi dan Misi Kementerian Kominfo

Visi:

Terwujudnya Indonesia **Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Misi:

Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.32. Visi dan Misi Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat

Visi:

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Misi:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance

Tujuan:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola system pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi

Sasaran:

1. Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik pempov Kalbar
2. Mengoptimalkan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan jumlah data set statistik sektoral yang terintegrasi
4. Meningkatkan kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah

Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dari pelayanan perangkat daerah, yaitu:

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum mencukupi kebutuhan.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang.
3. Lemah dan belum tersedianya jaringan informasi dan telekomunikasi di daerah Blankspot.
4. Pengaruh media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.
5. Ancaman keamanan data dan informasi dalam implementasi SPBE.

Ada beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut:

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.
2. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK. Baik factor Penghambat maupun factor Pendorong ini sama dengan yang dihadapi oleh Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24 / 1992), Yang Kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/ 2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang - Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu Yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif Yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi.
4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

- 1) Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besarseperti perkebunan, perusahaan HPH – HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung
- 2) Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut
- 3) Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV: *High Conservation Value*) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng-enclave lahan perusahaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas.
- 4) Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum.
- 5) Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi.
- 6) Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda
- 7) Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.
- 9) Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;

- 10) Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- 11) Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat
- 12) Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan.
- 13) Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

- 1) Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci
- 2) Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya.
- 3) Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan *illegal*, khususnya *illegal logging*
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat
- 6) Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan
- 7) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

- 1) Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
- 2) Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro-minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro-minapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.
- 3) Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi
- 4) Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai.
- 5) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan
- 6) Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanan, serta kegiatan industri turunannya

- 7) Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- 8) Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut.
- 9) Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya.
- 10) Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang.
- 11) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi
- 12) Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukan industri Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :

- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
- 3) Program – program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya
- 2) Penetapan zona pengelolaan limbah domestik
- 3) Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- 4) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill.
- 5) Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman.
- 6) Pnaatan penerapan Prosedur Standar Operasitpa Sistem Sanitary Landfill.
- 7) Disediaknya sumur control disekitar kawasan tpa untuk mengetahui apakah air tanah disekitar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya

- 2) Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap air
- 4) Lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan.

kajian yang telah dilakukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 - 2031 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif tersebut, yang kemudian dirumuskan langkah - langkah upaya pencegahan dan pengendalian dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. rekomendasi untuk meminimalkan dampak serta memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam Dan Manusia tersebut adalah:

1. Harus segera membuat peraturan daerah, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten sebagai payung hukum segala kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dilaksanakan di setiap sektor. paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*green development – suistainable development*) dengan mengaplikasikangreen economy (ekonomi hijau / berkelanjutan) sangat penting dilakukan sebagai acuan yang menjiwai penyusunan turunan kebijakan dan Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memaksimalkan upaya – upaya mekanisme pasar jasa lingkungan, khususnya berkaitan dengan perdagangan karbon (*carbon trade*) dan kesediaan membayar imbal jasa hulu – hilir (*willingness to pay*) das kapuas. guna mempercepat usaha ini maka perlunya pembentukan tim ahli tersendiri yang menyiapkan mekanisme tersebut, dari rencana, mediasi/fasilitasi, hingga aksi. tim ini harus berasal dari berbagai elemen *stake holder*, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan anggota masyarakat.
3. Penguatan upaya inovasi dan *marketing* ekowisata dari promosi hingga penarikan minat investor, sehingga dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara.
4. Memasukkan muatan lokal pengenalan sumberdaya alam dan lingkungan kabupaten kapuas hulu dalam kurikulum sekolah. pendidikan lingkungan yang bermuatan lokal merupakan suatu upaya mentransfer ilmu pengetahuan bagi murid – murid sekolah yang merupakan generasi muda kapuas hulu untuk mencintai, memahami, dan manfaat fungsi dan peranan kekayaan alam kapuas hulu.
5. Pengintegrasian nilai – nilai kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat dengan ilmu pengetahuan modern guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana.

3.5 Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan SPBE baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saling bersinergi maka dapat mewujudkan tata kelola SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

2. Perkembangan tren Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK 4.0) merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah maupun layanan publik..
3. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan e-Government
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - d. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 - e. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - h. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 - i. Terwujudnya Tata Kelola Keamanan Informasi Yang Komprehensif dan Implementatif
 - j. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi Pada Pengguna
 - k. Terwujudnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government
 - l. Pengembangan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu dengan basis satu data (onedata).
 - m. Pembinaan keterbukaan informasi publik untuk pemerintahan desa;
 - n. Mendorong produktivitas kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pembentukan KIM pada wilayah wilayah strategis;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 - 2026 mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026, yaitu *"Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil"*. Visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai landasan dasar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan langkah strategis dalam mengelola bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan Misi ke 4 (empat) yaitu *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas"*.

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 dalam meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu diwujudkan dengan sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, sasaran ini merupakan pewujudan dalam mencapai tujuan jangka menengah pada urusan bidang komunikasi dan Informatika, urusan bidang statistik serta urusan bidang persandian dalam masa 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik dengan sasaran Meningkatkan kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Target Kinerja					Unit Kerja
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	---	Predikat SPBE Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,65	2,7	2,8	2,9	3,0	
		---	Predikat pembangunan statistik sektoral		Cukup	Baik	Baik	Baik	
		Meningkatnya kualitas pembangunan statistik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan statistik		2,00	2,26	2,30	2,40	
			Jumlah Dataset yang Terintegrasi			330	345	360	
2	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	---	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Daerah	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
		Meningkatnya kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,1	88,2	88,3	88,5	88,7	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	---	Nilai Sakip Daerah	75	76	78	80	81	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	BB	BB	A	A	

Sumber : Data Olahan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

5.1. Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 untuk mencapai Misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”. Strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun 2021 - 2026 dengan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Melaksanakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
3. Melaksanakan Pembangunan Statistik
4. Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan dan responsif
5. Menerapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang bersih, terukur dan transparan pada perangkat daerah

Tabel. 5.1
Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	1.1 Meningkatkan kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	1.1.1 Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Informatika
			1.1.2 Melaksanakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
		1.2 Meningkatkan kualitas Pembangunan statistik Kabupaten Kapuas Hulu	1.2.1 Melaksanakan Pembangunan Statistik Sektoral
2	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	2.1 Meningkatkan kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	2.1.1 Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan dan responsif
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1.1 Menerapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang bersih, terukur dan transparan pada perangkat daerah

5.2. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Arah kebijakan dalam pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, merupakan langkah dalam mewujudkan strategi dalam pembangunan di bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan persandiaan dan bidang statistik untuk 5 (lima) tahun kedepannya, untuk melihat arah kebijakan dalam pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 5.2
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026

1. Tujuan Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan	
1		2		3	
1.1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	1.1.1	Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.1.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah
				1.1.1.2	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah
		1.1.2	Melaksanakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
				1.1.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
1.2	Meningkatnya kualitas pembangun statistik Kabupaten Kapuas Hulu	1.2.1	Melaksanakan Pembangunan Statistik	1.2.1.1	Penyelenggaraan Statistik di lingkup Pemerintah Daerah
2.1	Meningkatnya kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	2.1.1	Meningkatkan Layanan Informasi Publik Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan dan responsif	2.1.1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1.1	Menerapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang bersih, terukur dan transparan pada perangkat daerah	3.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				3.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				3.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				3.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				3.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah
				3.1.1.7	Penyediaan Jasa pada Perangkat Daerah
				3.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2021 - 2026

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana pendanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan yang terdiri dari :

6.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Wajib Dinas Komunikasi dan Informasi

Dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, yang berisikan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan difokuskan untuk pencapaian tujuan meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pata pemerintahan berbasis e-government, meningkatnya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib ini dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama dalam Renstra Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Wajib
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024

No	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Kerangka Pendanaan Indikatif						Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Kondisi Pendanaan Indikatif Pada Akhir Tahun
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi								
1	1	Kualitas Tata Kelola Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indek SPBE								BIDANG SAI
	1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Total bobot domain evaluasi SPBE								BIDANG SAI

1	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan Nama domain yg telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kapuas hulu								BIDANG SAI
1	1	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa	24.586.500	75.000.000	850.000.000	95.000.000	105.000.000	115.000.000	1.264.586.500	BIDANG SAI
1	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	89.943.570	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000	789.943.570	BIDANG SAI
1	1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu	-	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000	1.950.000.000	950.000.000	6.872.000.000	BIDANG SAI
2	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah Kab. Kapuas Hulu	230.867.700	6.180.000.000	5.373.000.000	6.714.650.000	8.215.115.000	9.041.126.500	35.754.759.200	BIDANG SAI

2	2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	52.435.500	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	241.576.500	1.059.777.000	BIDANG SAI
2	2	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	-	265.000.000	291.500.000	560.000.000	616.000.000	677.600.000	2.410.100.000	BIDANG SAI
2	2	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Center Kabupaten Kapuas Hulu	-	850.000.000	935.000.000	1.028.500.000	1.131.350.000	1.244.485.000	5.189.335.000	BIDANG SAI
2	2	3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Akses Internet	20.529.600	850.000.000	1.450.000.000	2.160.000.000	3.205.000.000	3.530.000.000	11.215.529.600	BIDANG SAI
2	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-	450.000.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000	658.845.000	2.747.295.000	BIDANG SAI
2	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	425.000.000	467.500.000	514.250.000	565.675.000	622.242.500	2.594.667.500	BIDANG SAI

2	2	6	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pendukung Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	105.946.900	235.000.000	258.500.000	284.350.000	312.785.000	344.063.500	1.540.645.400	BIDANG SAI
2	2	7	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Integrasi Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	-	145.000.000	159.500.000	175.450.000	192.995.000	212.294.500	885.239.500	BIDANG SAI
2	2	8	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Ekosistem Smart City Kabupaten Kapuas Hulu	-	350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.850.000	512.435.000	2.136.785.000	BIDANG SAI
2	2			Jumlah Fasilitas Command Center Kapuas Hulu	-	1.900.000.000	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	2.596.150.000	BIDANG SAI
2	2	9	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring dan fasilitasi usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet)	51.955.700	145.000.000	159.500.000	175.450.000	192.995.000	212.294.500	937.195.200	BIDANG SAI

2	2	11		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK	-	245.000.000	269.500.000	296.450.000	326.095.000	358.704.500	1.495.749.500	BIDANG SAI
2	2	12	Pengelolaan Government Information (GCIO) Chief Officer	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kab. Kapuas Hulu	-	155.000.000	170.500.000	187.550.000	206.305.000	226.935.500	946.290.500	BIDANG SAI
3	2	Kualitas Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)								BIDANG KIP
		Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								BIDANG KIP
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										BIDANG KIP
3	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	419.752.040	1.943.000.000	2.337.300.000	2.496.030.000	2.670.633.000	2.862.696.300	12.729.411.340	BIDANG KIP
3	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500	274.729.500	BIDANG KIP
3	1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase disposisi laporan ke OPD	31.043.840	90.000.000	99.000.000	108.900.000	119.790.000	131.769.000	580.502.840	BIDANG KIP
3	1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi		85.000.000	93.500.000	102.850.000	113.135.000	124.448.500	518.933.500	BIDANG KIP

3	1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	139.987.000	260.000.000	286.000.000	314.600.000	346.060.000	380.666.000	1.727.313.000	BIDANG KIP
3	1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten	213.212.900	270.000.000	297.000.000	326.700.000	359.370.000	395.307.000	1.861.589.900	BIDANG KIP
3	1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload	35.508.300	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	139.089.500	615.492.800	BIDANG KIP
3	1	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan Pemda		500.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.500.000.000	BIDANG KIP
3	1	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kemitraan yang terbentuk dengan pemda		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000	BIDANG KIP
3	1	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Laporan Manjamen Krisis		98.000.000	107.800.000	118.580.000	130.438.000	143.481.800	598.299.800	BIDANG KIP
3	1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelatihan/bimte/sosialisasi		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	915.765.000	BIDANG KIP
3	1	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah fasilitasi sengketa informasi		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000	BIDANG KIP
3	1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan kemitraan		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	915.765.000	BIDANG KIP

4	3	Persandian										BIDANG SAI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Predikat KAMI Kabupaten Kapuas Hulu								
4	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Terlaksannya Sterilisasi Tempat Sterategis (Ruangan Kerja Pimpinan)	60.522.300	1.612.500.000	1.773.750.000	1.951.125.000	1.680.387.500	1.848.426.250	5.465.784.800	BIDANG SAI
4	1	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.522.300	-	-	-	-	-	60.522.300	BIDANG SAI
4	1	2		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Urusan Persandian	-	350.000.000	385.000.000	423.500.000	-	-	808.500.000	BIDANG SAI
4	1	3	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dengan Kompetensi Bidang Kemanan Infomasi Berbasis TIK	-	135.000.000	148.500.000	163.350.000	179.685.000	197.653.500	491.535.000	BIDANG SAI

4	1	4		Jumlah Forum Komunikasi Persandian Daerah yang Partisipatif	-	137.500.000	151.250.000	166.375.000	183.012.500	201.313.750	500.637.500	BIDANG SAI
4	1	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	241.576.500	600.765.000	BIDANG SAI
4	1	6		Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Secara Komprehensif	-	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	728.200.000	BIDANG SAI
4	1	7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Layanan Keamanan Informasi yang Berorientasi Pada Kebutuhan Pengguna	-	195.000.000	214.500.000	235.950.000	259.545.000	285.499.500	709.995.000	BIDANG SAI
4	1	8		Jumlah Peningkatan Kapasitas Teknologi Kemanan Informasi yang Andal		255.000.000	280.500.000	308.550.000	339.405.000	373.345.500	928.455.000	BIDANG SAI
4	1	9		Jumlah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		175.000.000	192.500.000	211.750.000	232.925.000	256.217.500	637.175.000	BIDANG SAI

5	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Terlaksananya Kerjasama dengan BSSN dalam penertipatan tandatangan digital dan email sinapati di lingkungan pemerintah	158.333.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000	658.845.000	724.729.500	1.802.295.000	BIDANG SAI
5	2	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Telekomunikasi Daerah	158.333.000	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000	1.092.300.000	BIDANG SAI
5	2	2		Jumlah Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Audit Kemanan Infromasi	-	195.000.000	214.500.000	235.950.000	259.545.000	285.499.500	709.995.000	BIDANG SAI
6	4	Statistik										BIDANG SAI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Presentase Kompilasi data statistik sectoral yang dilakukan								
6	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase OPD yang menggunakan data ststistik Sektoral dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	215.663.180	870.000.000	792.000.000	1.036.200.000	958.320.000	1.235.652.000	5.107.835.180	BIDANG SAI
6	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	167.848.180	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000	1.694.123.180	BIDANG SAI
6	1	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM berkualitas untuk peningkatan mutu statistik daerah	-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	915.765.000	BIDANG SAI

6	1	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Terhimpunnya Metadata Statistik Sektoral	47.815.000	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	780.427.000	BIDANG SAI
6	1	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Terbentuknya Forum Statistik Sektoral		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000	BIDANG SAI
6	1	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana pengembangan statistik sektoral		150.000.000	-	165.000.000	-	181.500.000	496.500.000	BIDANG SAI
6	1	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000	BIDANG SAI

Sumber : Data Olahan

6.2. Program, Kegiatan dan Pendanaan Rutin atau Oprasional

Program dan kegiatan rutin atau oprasional serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 merupakan program dan kegiatan pendukung mencapai tujuan dan sasaran yang di laksanakan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistic sectoral dalam waktu kurun 5 (lima) tahun, untuk melihat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.2
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rutin atau
OprasionalDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Hulu
Tahun 2021– 2026

No	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Kerangka Pendanaan Indikatif							Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pendanaan Indikatif Pada Akhir Tahun	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya penerapan akuntabilitas		NILAI SAKIP	3.369.647.166	14.218.606.383	15.090.467.021	16.599.513.723	18.259.465.095	20.085.411.605	87.623.110.992	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3.369.647.166	14.218.606.383	15.090.467.021	16.599.513.723	18.259.465.095	20.085.411.605	87.623.110.992	BIDANG SEKRETARIAT
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.369.647.166	14.218.606.383	15.090.467.021	16.599.513.723	18.259.465.095	20.085.411.605	87.623.110.992	BIDANG SEKRETARIAT

1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.176.500	143.194.150	157.513.565	173.264.922	190.591.414	209.650.555	1.004.391.105	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra Diskominfo 2021-2024 ; 2. IKU Diskominfo 2021-2024 ; 3. Renja Diskominfo 2022; 4. KAK Renja Diskominfo 2021; 5.Renja Perubahan Diskominfo 2021 .	100.491.500	110.540.650	121.594.715	133.754.187	147.129.605	161.842.566	775.353.222	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Diskominfo2022;	4.987.500	5.486.250	6.034.875	6.638.363	7.302.199	8.032.419	38.481.605	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA Diskominfo2022;	4.867.500	5.354.250	5.889.675	6.478.643	7.126.507	7.839.157	37.555.732	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Diskominfo 2021	4.987.500	5.486.250	6.034.875	6.638.363	7.302.199	8.032.419	38.481.605	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA Diskominfo 2021	4.867.500	5.354.250	5.889.675	6.478.643	7.126.507	7.839.157	37.555.732	BIDANG SEKRETARIAT

1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.987.500	5.486.250	6.034.875	6.638.363	7.302.199	8.032.419	38.481.605	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Monev Kinerja Diskominfo Tahun 2021 per-triwulan; 2. Pengukuran Kinerja Diskominfo 2021 per-triwulan.	4.987.500	5.486.250	6.034.875	6.638.363	7.302.199	8.032.419	38.481.605	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.889.835.098	2.089.783.108	2.298.761.419	2.528.637.560	2.781.501.316	3.059.651.448	14.648.169.949	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo	1.606.127.298	1.766.740.028	1.943.414.031	2.137.755.434	2.351.530.977	2.586.684.075	12.392.251.842	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.120.000	221.232.000	243.355.200	267.690.720	294.459.792	323.905.771	1.551.763.483	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Verifikasi	34.412.600	37.853.860	41.639.246	45.803.171	50.383.488	55.421.836	265.514.201	BIDANG SEKRETARIAT

2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	15.567.600	17.124.360	18.836.796	20.720.476	22.792.523	25.071.775	120.113.530	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Barang yang dikelola		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan RFK - 0 (Jan-Des 2021) ; 2.Laporan Keuangan Semesteran (Jan s/d Juni 2021); 3. Laporan Fungsional Keuangan	32.607.600	35.868.360	39.455.196	43.400.716	47.740.787	52.514.866	251.587.525	BIDANG SEKRETARIAT
3	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.262.500	106.882.250	117.570.475	129.327.523	142.260.275	156.486.302	719.789.324	BIDANG SEKRETARIAT

3	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Amankan		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2021	67.262.500	73.988.750	81.387.625	89.526.388	98.479.026	108.326.929	518.971.218	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT

4	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	167.997.300	220.761.530	242.837.683	267.121.451	293.833.596	323.216.956	1.515.768.517	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Spanduk dan Banner pembinaan disiplin pegawai	7.480.000	8.228.000	9.050.800	9.955.880	10.951.468	12.046.615	57.712.763	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	122.102.000	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUK ; 2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Absen	38.375.100	42.212.610	46.433.871	51.077.258	56.184.984	61.803.482	296.087.305	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 2. Penetapan Standar Teknik Kegiatan SKP 3.reformasi Birokrasi Dinas Kominfo	17.142.200	18.856.420	20.742.062	22.816.268	25.097.895	27.607.685	132.262.530	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun							0	BIDANG SEKRETARIAT

4	4	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas								0	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Pindah							0	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Diklat	105.000.000	115.500.000	127.050.000	139.755.000	153.730.500	169.103.550	810.139.050	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan		5.482.250	6.030.475	6.633.523	7.296.875	8.026.562	33.469.684	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Pegawai yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	30.525.500	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.640.000	507.804.000	558.584.400	614.442.840	675.887.124	743.475.836	3.511.834.200	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	122.102.000	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.306.000	66.336.600	72.970.260	80.267.286	88.294.015	97.123.416	465.297.577	BIDANG SEKRETARIAT

5	5	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.443.000	23.587.300	25.946.030	28.540.633	31.394.696	34.534.166	165.445.825	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik		20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	122.102.000	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.015.000	64.916.500	71.408.150	78.548.965	86.403.862	95.044.248	455.336.724	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	61.051.000	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	7	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Penyediaan Bahan/ Material	6.800.000	7.480.000	8.228.000	9.050.800	9.955.880	10.951.468	52.466.148	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.360.000	33.396.000	36.735.600	40.409.160	44.450.076	48.895.084	234.245.920	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.956.000	230.951.600	254.046.760	279.451.436	307.396.580	338.136.238	1.619.938.613	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Agenda Surat Masuk dan Keluar	23.760.000	26.136.000	28.749.600	31.624.560	34.787.016	38.265.718	183.322.894	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	30.525.500	BIDANG SEKRETARIAT

6	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		10.245.172.000	10.719.689.200	11.791.658.120	12.970.823.932	14.267.906.325	#####	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	183.153.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		500.000.000		-	-	-	500.000.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	3	Pengadaan Alat Besar								0	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								0	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	183.153.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	61.051.000	BIDANG SEKRETARIAT

6	6	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	915.765.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud		50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	305.255.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.275.172.000	10.202.689.200	11.222.958.120	12.345.253.932	13.579.779.325	56.625.852.577	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	305.255.000	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	915.765.000	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.142.220	325.456.442	358.002.086	393.802.295	433.182.524	476.500.777	2.210.086.344	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah matrai	7.920.000	8.712.000	9.583.200	10.541.520	11.595.672	12.755.239	61.107.631	BIDANG SEKRETARIAT

7	7	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; 2.Rekening PDAM; 3.Rekening PLN; 4.Rekening Indihome; 5.Rekening TV Kabel; 6.Laporan Pengelolaan Website	143.550.000	157.905.000	173.695.500	191.065.050	210.171.555	231.188.711	1.107.575.816	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000	488.408.000	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.672.220	78.839.442	86.723.386	95.395.725	104.935.297	115.428.827	552.994.897	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.593.548	579.552.903	637.508.193	701.259.012	771.384.914	848.523.405	4.017.821.975	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	61.051.000	BIDANG SEKRETARIAT

8	8	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK ; 2.PKB ; 3. Biaya perbaikan	91.696.000	100.865.600	110.952.160	122.047.376	134.252.114	147.677.325	707.490.575	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Besar		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	30.525.500	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	30.525.500	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800	48.840.800	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	81.250.000	89.375.000	98.312.500	108.143.750	118.958.125	130.853.938	626.893.313	BIDANG SEKRETARIAT
				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang AC								
				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Komputer personal/ Laptop								
				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Printer								
8	8	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800	48.840.800	BIDANG SEKRETARIAT

8	8	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	30.525.500	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.183.000	221.301.300	243.431.430	267.774.573	294.552.030	324.007.233	1.552.249.567	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	61.051.000	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.464.548	116.011.003	127.612.103	140.373.313	154.410.645	169.851.709	813.723.321	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	6.105.100	BIDANG SEKRETARIAT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 pada misi ke 4 (empat) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”.

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang terdiri dari 1). Bidang urusan komunikasi dan informatika, dan bidang urusan statistik sektoral dan persandian. Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja di bidang urusan tersebut, dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan program prioritas tersebut diatas merupakan program-program yang berhubungan langsung dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun Renstra 2021-2026. Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 untuk masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2.65	2.7	2.8	2.9	3.0
			Meningkatnya kualitas Pembangunan statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks pembangunan statistik		2.00	2.26	2.30	3.40
				Jumlah Dataset yang Terintegrasi			330	345	360
2	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik		Meningkatnya kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks KIP	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	BB	BB	A	A

Sumber : Data Olahan

7.2. Kinerja Bidang Urusan Wajib Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 berisikan kinerja program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan, kinerja ini merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja bidang urusan yang dilaksanakan yang terdiri dari bidang urusan wajib komunikasi dan informatika, dan bidang urusan wajib statistik sektoral dan persandian. Untuk melihat rencana kinerja berdasarkan bidang urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Rencana Kinerja Bidang Urusan Wajib
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapas Hulu Tahun 2021 – 2026

No	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Rencana Capaian tahun 2020	Satuan	Kerangka Kerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kerja pada Akhir Tahun	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Kualitas Tata Kelola Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indek SPBE	2,60	2,60 / Cukup	Indeks	2,60 / Cukup	2,65 / Cukup	2,70 / Cukup	2,80 / Cukup	2,90 / Cukup	3,00 / Baik	3,00 / Baik	BIDANG SAI
	1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Total bobot domain evaluasi SPBE											
1	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Nama domain yg telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kapuas hulu											BIDANG SAI

1	1	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa			Domain	10	15	20	25	30	35	35	BIDANG SAI
1	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu			Domain dan sub Domain	56	77	80	83	85	88	88	BIDANG SAI
1	1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu			Lokasi	-	13	9	11	16	5	44	BIDANG SAI
2	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan SPBE di Lingkungan pemerintahan Kapuas Hulu		Bulan		12							BIDANG SAI
2	2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu			OPD	26	26	26	26	26	26	26	BIDANG SAI
2	2	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu			Dokumen	-	1	1	2	2	2	8	BIDANG SAI

2	2	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Center Kabupaten Kapuas Hulu			Presentase	-	60%	70%	80%	90%	100%	100%	BIDANG SAI
2	2	3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Akses Internet			Lokasi	1	14	23	34	50	55	54	BIDANG SAI
2	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			Dokumen	-	2	2	2	2	2	10	BIDANG SAI
2	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			Dokumen	-	2	2	2	2	2	10	BIDANG SAI
2	2	6	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu			Aplikasi	3	5	5	5	4	4	25	BIDANG SAI
2	2	7	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Integrasi Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu			Layanan	-	2	2	2	2	2	10	BIDANG SAI
2	2	8	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Ekosistem Smart City Kabupaten Kapuas Hulu			Kegiatan	-	2	2	2	2	2	10	BIDANG SAI

2	2	9		Jumlah Fasilitas Command Center Kapuas Hulu			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
2	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring dan fasilitas usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet)			Lokasi	23	23	23	23	23	23	115	BIDANG SAI
2	2	11		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK			Kegiatan	-	2	2	2	2	2	10	BIDANG SAI
2	2	12	Pengelolaan Government Information (GCIO) Chief Officer	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kab. Kapuas Hulu			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
3	2	Kualitas Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Keteterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	Baik	Indeks	88,1 Baik	88,1 Baik	88,2 Baik	88,3 Baik	88,5 Baik	88,7 Baik	88,7 Baik	BIDANG KIP
		Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,00 Baik	81,83 / Baik	Indeks	81,83 Baik	81,90 Baik	82,00 Baik	82,15 Baik	82,30 Baik	83,00 Baik	83,00 Baik	BIDANG KIP
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													BIDANG KIP
3	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											BIDANG KIP

3	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Dokumen	0	8	8	8	8	8	8	BIDANG KIP
3	1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase disposisi laporan ke OPD			Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BIDANG KIP
3	1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi			Dokumen	0	4	4	4	4	4	4	BIDANG KIP
3	1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi			Konten	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.200	BIDANG KIP
3	1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten			Sebaran	6.740	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	BIDANG KIP
3	1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload			Dokumen	150	200	230	250	270	300	320	BIDANG KIP
3	1	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan Pemda			Media	0	7	10	7	7	7	7	BIDANG KIP
3	1	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kemitraan yang terbentuk dengan pemda			Mitra	0	10	11	12	13	14	15	BIDANG KIP
3	1	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Laporan Manajemen Krisis			Laporan	0	4	5	6	7	8	9	BIDANG KIP

3	1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelatihan/bimte/sosialisasi			Kegiatan	0	3	4	4	5	5	6	BIDANG KIP
3	1	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah fasilitasi sengketa informasi			Fasilitasi	0	5	6	7	8	10	11	BIDANG KIP
3	1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan kemitraan			Kegiatan	0	3	4	4	5	5	6	BIDANG KIP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Predikat KAMI Kabupaten Kapuas Hulu											
4	1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-goverenmen											BIDANG SAI
4	1	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen	1	0	0	0	0	0	1	BIDANG SAI

4	1	2		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Urusan Persandian			Dokumen	-	1	1	2	0	0	4	BIDANG SAI
4	1	3	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dengan Kompetensi Bidang Kemanan Infromasi Berbasis TIK			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
4	1	4		Jumlah Forum Komunikasi Persandian Daerah yang Partisipatif			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
4	1	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
4	1	6		Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Secara Komprehensif			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
4	1	7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Layanan Keamanan Informasi yang Berorientasi Pada Kebutuhan Pengguna			Layanan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI

4	1	8		Jumlah Peningkatan Kapasitas Teknologi Kemanan Informasi yang Andal			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
4	1	9		Jumlah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
5	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											BIDANG SAI
5	2	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Telekomunikasi Daerah			Kecamatan	23	23	23	23	23	23	23	BIDANG SAI
5	2	2		Jumlah Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Audit Kemanan Informasi			OPD	-	49	49	49	49	49	49	BIDANG SAI
6	4	Statistik													BIDANG SAI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Presentase Kompilasi data statistik sektoral yang dilakukan											

6	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase OPD yang menggunakan data statistik Sektoral dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah											BIDANG SAI
6	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Terhimpunnya Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu			Dokumen	1	1	1	1	1	1	6	BIDANG SAI
6	1	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM berkualitas untuk peningkatan mutu statistik daerah			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
6	1	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral			Dokumen	1	1	1	1	1	1	6	BIDANG SAI
6	1	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Forum Statistik Sektoral			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI
6	1	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sarana dan Prasarana pengembangan statistik sektoral			Aplikasi	-	1	1	1	1	1	3	BIDANG SAI
6	1	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral			Kegiatan	-	1	1	1	1	1	5	BIDANG SAI

Sumber : Data Olahan

7.3. Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana kinerja urusan rutin atau oprasional Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari kinerja program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk melihat rencana kinerja di urusan rutin dan oprasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.3
Rencana Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Hulu
Tahun 2021 – 2026

No	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Rencana Capaian tahun 2020	Satuan	Kerangka Kerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kerja pada Akhir Tahun	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya penerapan akuntabilitas		NILAI SAKIP	73,92 / BB	74,42 / BB	Predikat	74,42 / BB	75 / BB	76 / BB	78 / BB	80 / BB	81 / BB	81 / BB	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	73,92 / BB	74,42 / BB	Predikat	74,42 / BB	75 / BB	76 / BB	78 / BB	80 / BB	81 / BB	81 / BB	BIDANG SEKRETARIAT
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-										BIDANG SEKRETARIAT
1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BIDANG SEKRETARIAT

1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra Diskominfo 2021-2024 ; 2. IKU Diskominfo 2021- 2024 ; 3. Renja Diskominfo 2022; 4. KAK Renja Diskominfo 2021; 5. Renja Perubahan Diskominfo 2021 .	-		Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Diskominfo2022;	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA Diskominfo2022;	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Diskominfo 2021	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA Diskominfo 2021	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Monev Kinerja Diskominfo Tahun 2021 per-triwulan; 2. Pengukuran Kinerja Diskominfo 2021 per- triwulan.	-		Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	BIDANG SEKRETARIAT

2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo	-		Orang	16	16	16	16	16	16	16	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		Orang/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Verifikasi	-		Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Barang yang dikelola	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan RFK - 0 (Jan-Des 2021) ; 2.Laporan Keuangan Semesteran (Jan s/d Juni 2021); 3. Laporan Fungsional Keuangan	-		Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	BIDANG SEKRETARIAT
3	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Amankan	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
3	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2021	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

3	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
4	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Spanduk dan Banner pembinaan disiplin pegawai	-		Buah	26	26	26	26	26	26	26	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-		Helai	0	33	33	33	33	33	33	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUK ; 2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Absen	-		Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 2. Penetapan Standar Teknik Kegiatan SKP 3.reformasi Birokrasi Dinas Kominfo	-		Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	-			0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT

4	4	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-			0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Pindah	-			0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Diklat	-		Orang	7	7	7	7	7	7	7	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	-		Peraturan	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
4	4	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Pegawai yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	-		Pegawai	0	33	33	33	33	33	33	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-		Instansi	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

5	5	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	-		Buah	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-		Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	JumlahBahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	-		Langganan	0	8	8	8	8	8	8	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	7	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Penyediaan Bahan/ Material	-		Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	-		Orang/Harian	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		Orang/Kegiatan	80	80	80	80	80	80	80	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Agenda Surat Masuk dan Keluar	-		Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	BIDANG SEKRETARIAT
5	5	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	JumlahDukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		Aplikasi	0	3	3	3	3	3	3	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

6	6	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		Unit	0	2	2	2	2	2	2	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		Unit	0	1	0	0	0	0	1	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	3	Pengadaan Alat Besar		-			0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-			0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-		Item	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		Buah	0	2	2	2	2	2	2	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-		Bangunan	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	-		Buah	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Bangunan	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

6	6	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Bangunan	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
6	6	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Bangunan	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
7	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah matriai	-		Lembar	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; 2.Rekening PDAM; 3.Rekening PLN; 4.Rekening Indihome; 5.Rekening TV Kabel; 6.Laporan Pengelolaan Website	-		Bulan/Langgan	12	12	12	12	12	12	12	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		Item	0	4	4	4	4	4	4	BIDANG SEKRETARIAT
7	7	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		Orang/Harian	4	4	4	4	4	4	4	BIDANG SEKRETARIAT
				Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		Orang/Bulan	36	36	36	36	36	36	36	

8	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	Presentase	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		Unit	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK ; 2.PKB ; 3. Biaya perbaikan	-		Unit	2	2	2	2	2	2	2	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-		Unit	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-		Unit	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	-		Unit	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-		Paket	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang AC	-		Unit	20	20	20	20	20	20	20	

				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Komputer personal/ Laptop	-		Unit	30	30	30	30	30	30	30	
				Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Printer	-		Unit	30	30	30	30	30	30	30	
8	8	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-		Buah	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-		Buah	0	5	5	5	5	5	5	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-		Bangunan	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Paket	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Paket	1	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT
8	8	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-		Paket	0	1	1	1	1	1	1	BIDANG SEKRETARIAT

Sumber : Data Olahan

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2021 - 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021- 2026. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah beedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga beedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kapuas Hulu diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dengan dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

L A M P I R A N

Lampiran 1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1. Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Predikat sapk	BB (74,42)	BB (74,80)	130.176.500	BB (75)	143.194.150	BB (76)	-	157.513.565	BB (78)	173.264.922	BB (80)	190.591.414	BB (81)	209.650.555	BB (81)	1.004.391.105		
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu			Indek SPBE	2,6	2,6	345.397.770	2,65	7.575.000.000	2,7	7.673.000.000	2,8	8.401.650.000	2,9	10.420.115.000	3,0	10.266.126.500	3,0	44.681.289.270			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,83	81,83	31.043.840	81,90	90.000.000	82	99.000.000	82,15	108.900.000	82,30	119.790.000	83	131.769.000	83	580.502.840			
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	----	-----	388.708.200	88,1	1.853.000.000	88,2	2.238.300.000	88,3	2.387.130.000	88,5	2.550.843.000	88,7	2.730.927.300	88,7	12.148.908.500			
	Jumlah Kompilasi data Statistik Sekretariat yang dilakukan			Jumlah OPD yang Mengajukan data Statistik Sekretariat dalam Menyusun perencanaan pembangunan Daerah	26	26	215.663.180	26	870.000.000	26	792.000.000	26	1.036.200.000	26	958.320.000	26	1.235.652.000	26	5.107.835.180			
Tujuan		2,16,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.134.796.976		23.736.606.383		25.100.767.021		27.497.193.723		31.350.213.095		33.214.234.405		145.033.811.602	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	
		2,16,01,2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.369.647.166		14.218.606.383		15.090.467.021		16.599.513.723		18.259.465.095		20.085.411.605		87.623.110.992	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	
		2,16,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			130.176.500		143.194.150		157.513.565		173.264.922		190.591.414		209.650.555		1.004.391.105	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	100.491.500	5 Dokumen	110.540.650	5 Dokumen	121.594.715	5 Dokumen	133.754.187	5 Dokumen	147.129.605	5 Dokumen	161.842.566	5 Dokumen	775.353.222	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	4.987.500	1 Dokumen	5.486.250	1 Dokumen	6.034.875	1 Dokumen	6.638.363	1 Dokumen	7.302.199	1 Dokumen	8.032.419	1 Dokumen	38.481.605	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	4.867.500	1 Dokumen	5.354.250	1 Dokumen	5.889.675	1 Dokumen	6.478.643	1 Dokumen	7.126.507	1 Dokumen	7.839.157	1 Dokumen	37.555.732	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	4.987.500	1 Dokumen	5.486.250	1 Dokumen	6.034.875	1 Dokumen	6.638.363	1 Dokumen	7.302.199	1 Dokumen	8.032.419	1 Dokumen	38.481.605	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	4.867.500	1 Dokumen	5.354.250	1 Dokumen	5.889.675	1 Dokumen	6.478.643	1 Dokumen	7.126.507	1 Dokumen	7.839.157	1 Dokumen	37.555.732	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.16,01,2,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	4.987.500	1 Dokumen	5.486.250	1 Dokumen	6.034.875	1 Dokumen	6.638.363	1 Dokumen	7.302.199	1 Dokumen	8.032.419	1 Dokumen	38.481.605	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		8 Dokumen	4.987.500	8 Dokumen	5.486.250	8 Dokumen	6.034.875	8 Dokumen	6.638.363	8 Dokumen	7.302.199	8 Dokumen	8.032.419	8 Dokumen	38.481.605	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,02,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.889.835.098		2.089.783.108		2.298.761.419		2.528.637.560		2.781.501.316		3.059.651.448		14.648.169.949	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang	1.606.127.298	16 Orang	1.766.740.028	16 Orang	1.943.414.031	16 Orang	2.137.755.434	16 Orang	2.351.530.977	16 Orang	2.586.684.075	16 Orang	12.392.251.842	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 orang/Bulan	201.120.000	12 orang/Bulan	221.232.000	12 orang/Bulan	243.355.200	12 orang/Bulan	267.690.720	12 orang/Bulan	294.459.792	12 orang/Bulan	323.905.771	12 orang/Bulan	1.551.763.483	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	34.412.600	4 Dokumen	37.853.860	4 Dokumen	41.639.246	4 Dokumen	45.803.171	4 Dokumen	50.383.488	4 Dokumen	55.421.836	4 Dokumen	265.514.201	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	15.567.600	1 Dokumen	17.124.360	1 Dokumen	18.836.796	1 Dokumen	20.720.476	1 Dokumen	22.792.523	1 Dokumen	25.071.775	1 Dokumen	120.113.530	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	32.607.600	2 Dokumen	35.868.360	2 Dokumen	39.455.196	2 Dokumen	43.400.716	2 Dokumen	47.740.787	2 Dokumen	52.514.866	2 Dokumen	251.587.525	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,16,01,2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			67.262.500		106.882.250		117.570.475		129.327.523		142.260.275		156.486.302		719.789.324	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,03,01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,03,02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,03,03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,03,04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	67.262.500	1 Dokumen	73.988.750	1 Dokumen	81.387.625	1 Dokumen	89.526.388	1 Dokumen	98.479.026	1 Dokumen	108.326.929	1 Dokumen	518.971.218	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			167.997.300		220.761.530		242.837.683		267.121.451		293.833.596		323.216.956		1.515.768.517	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		26 Buah	7.480.000	26 Buah	8.228.000	26 Buah	9.050.800	26 Buah	9.955.880	26 Buah	10.951.468	26 Buah	12.046.615	26 Buah	57.712.763	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Helai	20.000.000	33 Helai	22.000.000	33 Helai	24.200.000	33 Helai	26.620.000	33 Helai	29.282.000	33 Helai	122.102.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	38.375.100	4 Dokumen	42.212.610	4 Dokumen	46.433.871	4 Dokumen	51.077.258	4 Dokumen	56.184.984	4 Dokumen	61.803.482	4 Dokumen	296.087.305	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.482.250	1 Dokumen	6.030.475	1 Dokumen	6.633.523	1 Dokumen	7.296.875	1 Dokumen	8.026.562	1 Dokumen	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3 Dokumen	17.142.200	3 Dokumen	18.856.420	3 Dokumen	20.742.062	3 Dokumen	22.816.268	3 Dokumen	25.097.895	3 Dokumen	27.607.685	3 Dokumen	132.262.530	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan																	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																-	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2.16.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan																-	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	105.000.000	7 Orang	115.500.000	7 Orang	127.050.000	7 Orang	139.755.000	7 Orang	153.730.500	7 Orang	169.103.550	7 Orang	810.139.050	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Peraturan	5.482.250	1 Peraturan	6.030.475	1 Peraturan	6.633.523	1 Peraturan	7.296.875	1 Peraturan	8.026.562	1 Peraturan	33.469.684	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Pegawai	5.000.000	33 Pegawai	5.500.000	33 Pegawai	6.050.000	33 Pegawai	6.655.000	33 Pegawai	7.320.500	33 Pegawai	30.525.500	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,16,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah			411.640.000		507.804.000		558.584.400		614.442.840		675.887.124		743.475.836		3.511.834.200	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan				1 Intalasi	20.000.000	1 Intalasi	22.000.000	1 Intalasi	24.200.000	1 Intalasi	26.620.000	1 Intalasi	29.282.000	1 Intalasi	122.102.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Dokumen	60.306.000	1 Dokumen	66.336.600	1 Dokumen	72.970.260	1 Dokumen	80.267.286	1 Dokumen	88.294.015	1 Dokumen	97.123.416	1 Dokumen	465.297.577	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,06,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Dokumen	21.443.000	1 Dokumen	23.587.300	1 Dokumen	25.946.030	1 Dokumen	28.540.633	1 Dokumen	31.394.696	1 Dokumen	34.534.166	1 Dokumen	165.445.825	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Buah	20.000.000	5 Buah	22.000.000	5 Buah	24.200.000	5 Buah	26.620.000	5 Buah	29.282.000	5 Buah	122.102.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1073 Cetak & 69975 Lembar	59.015.000	1180 Cetak & 76972 Lembar	64.916.500	1298 Cetak & 84669 Lembar	71.408.150	1427 Cetak & 93135 Lembar	78.548.965	1569 Cetak & 102448 Lembar	86.403.862	1725 Cetak & 112692 Lembar	95.044.248	1725 Cetak & 112692 Lembar	455.336.724	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Langganan	10.000.000	8 Langganan	11.000.000	8 Langganan	12.100.000	8 Langganan	13.310.000	8 Langganan	14.641.000	8 Langganan	61.051.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	6.800.000	1 Paket	7.480.000	1 Paket	8.228.000	1 Paket	9.050.800	1 Paket	9.955.880	1 Paket	10.951.468	1 Paket	52.466.148	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1200 Orang/Harian	30.360.000	1200 Orang/Harian	33.396.000	1200 Orang/Harian	36.735.600	1200 Orang/Harian	40.409.160	1200 Orang/Harian	44.450.076	1200 Orang/Harian	48.895.084	1200 Orang/Harian	234.245.920	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 Orang/Kegiatan	209.956.000	80 Orang/Kegiatan	230.951.600	80 Orang/Kegiatan	254.046.760	80 Orang/Kegiatan	279.451.436	80 Orang/Kegiatan	307.396.580	80 Orang/Kegiatan	338.136.238	80 Orang/Kegiatan	1.619.938.613	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.16,01,2,06,10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4 Dokumen	23.760.000	4 Dokumen	26.136.000	4 Dokumen	28.749.600	4 Dokumen	31.624.560	4 Dokumen	34.787.016	4 Dokumen	38.265.718	4 Dokumen	183.322.894	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,06,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Aplikasi	5.000.000	3 Aplikasi	5.500.000	3 Aplikasi	6.050.000	3 Aplikasi	6.655.000	3 Aplikasi	7.320.500	3 Aplikasi	30.525.500	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2,16,01,2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			-		10.245.172.000		10.719.689.200		11.791.658.120		12.970.823.932		14.267.906.325		59.995.249.577	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16,01,2,07,01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000	2 Unit	36.300.000	2 Unit	39.930.000	2 Unit	43.923.000	2 Unit	183.153.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2,16,01,2,07,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000				-		-		-	1 Unit	500.000.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,16,01,2,07,03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan															0	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,07,04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan															0	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,07,05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Item	30.000.000	5 Item	33.000.000	5 Item	36.300.000	5 Item	39.930.000	5 Item	43.923.000	5 Item	183.153.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,07,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Buah	10.000.000	2 Buah	11.000.000	2 Buah	12.100.000	2 Buah	13.310.000	2 Buah	14.641.000	2 Buah	61.051.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2,16,01,2,07,07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Bangunan	150.000.000	1 Bangunan	165.000.000	1 Bangunan	181.500.000	1 Bangunan	199.650.000	1 Bangunan	219.615.000	1 Bangunan	915.765.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,16,01,2,07,08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				5 Buah	50.000.000	5 Buah	55.000.000	5 Buah	60.500.000	5 Buah	66.550.000	5 Buah	73.205.000	5 Buah	305.255.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,07,09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Bagunan	9.275.172.000	1 Bagunan	10.202.689.200	1 Bagunan	11.222.958.120	1 Bagunan	12.345.253.932	1 Bagunan	13.579.779.325	1 Bagunan	56.625.852.577	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit dan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Bagunan	50.000.000	1 Bagunan	55.000.000	1 Bagunan	60.500.000	1 Bagunan	66.550.000	1 Bagunan	73.205.000	1 Bagunan	305.255.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,07,11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit dan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Bagunan	150.000.000	1 Bagunan	165.000.000	1 Bagunan	181.500.000	1 Bagunan	199.650.000	1 Bagunan	219.615.000	1 Bagunan	915.765.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.142.220		325.456.442		358.002.086		393.802.295		433.182.524		476.500.777		2.210.086.344	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		12 Laporan	7.920.000	12 Laporan	8.712.000	12 Laporan	9.583.200	12 Laporan	10.541.520	12 Laporan	11.595.672	12 Laporan	12.755.239	12 Laporan	61.107.631	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	143.550.000	12 Laporan	157.905.000	12 Laporan	173.695.500	12 Laporan	191.065.050	12 Laporan	210.171.555	12 Laporan	231.188.711	12 Laporan	1.107.575.816	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	88.000.000	12 Laporan	96.800.000	12 Laporan	106.480.000	12 Laporan	117.128.000	12 Laporan	488.408.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	71.672.220	12 Laporan	78.839.442	12 Laporan	86.723.386	12 Laporan	95.395.725	12 Laporan	104.935.297	12 Laporan	115.428.827	12 Laporan	552.994.897	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,16,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			479.593.548		579.552.903		637.508.193		701.259.012		771.384.914		848.523.405		4.017.821.975	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.100.000	1 Unit	13.310.000	1 Unit	14.641.000	1 Unit	61.051.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	91.696.000	2 unit	100.865.600	2 unit	110.952.160	2 unit	122.047.376	2 unit	134.252.114	2 unit	147.677.325	2 unit	707.490.575	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,09,03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	6.050.000	1 Unit	6.655.000	1 Unit	7.320.500	1 Unit	30.525.500	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2,16,01,2,09,04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	6.050.000	1 Unit	6.655.000	1 Unit	7.320.500	1 Unit	30.525.500	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16,01.2,09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	8.000.000	5 Unit	8.800.000	5 Unit	9.680.000	5 Unit	10.648.000	5 Unit	11.712.800	5 Unit	48.840.800	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16,01.2,09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	81.250.000	80 Unit	89.375.000	80 Unit	98.312.500	80 Unit	108.143.750	80 Unit	118.958.125	80 Unit	130.853.938	80 Unit	626.893.313	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16,01.2,09,07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.000.000	5 Unit	8.800.000	5 Unit	9.680.000	5 Unit	10.648.000	5 Unit	11.712.800	5 Unit	48.840.800	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16,01.2,09,08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.500.000	5 Unit	6.050.000	5 Unit	6.655.000	5 Unit	7.320.500	5 Unit	30.525.500	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16,01.2,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit / Bangunan	201.183.000	1 Unit / Bangunan	221.301.300	1 Unit / Bangunan	243.431.430	1 Unit / Bangunan	267.774.573	1 Unit / Bangunan	294.552.030	1 Unit / Bangunan	324.007.233	1 Unit / Bangunan	1.552.249.567	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit / Paket	10.000.000	1 Unit / Paket	11.000.000	1 Unit / Paket	12.100.000	1 Unit / Paket	13.310.000	1 Unit / Paket	14.641.000	1 Unit / Paket	61.051.000	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit / Paket	105.464.548	1 Unit / Paket	116.011.003	1 Unit / Paket	127.612.103	1 Unit / Paket	140.373.313	1 Unit / Paket	154.410.645	1 Unit / Paket	169.851.709	1 Unit / Paket	813.723.321	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2,16,01,2,09,12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha / Paket	1.000.000	1 Ha / Paket	1.100.000	1 Ha / Paket	1.210.000	1 Ha / Paket	1.331.000	1 Ha / Paket	1.464.100	1 Ha / Paket	6.105.100	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2,16,02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat Keterbukaan Informasi Publik			419.752.040		1.943.000.000		2.337.300.000		2.496.030.000		2.670.633.000		2.862.696.300		12.729.411.340	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Badau, Semitau, Silat Hulu		
		2,16,02,2,	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks			419.752.040		1.943.000.000		2.337.300.000		2.496.030.000		2.670.633.000		2.862.696.300		12.729.411.340	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Badau, Semitau, Silat Hulu		
		2,16,02,2,01,01	Perumusan Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				8 dokumen	45.000.000	8 dokumen	49.500.000	8 dokumen	54.450.000	8 dokumen	59.895.000	8 dokumen	65.884.500	8 dokumen	274.729.500	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
		2,16,02,2,01,02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase disposisi laporan ke OPD		100%	31.043.840	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	131.769.000	100%	580.502.840	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi				4 dokumen	85.000.000	4 dokumen	93.500.000	4 dokumen	102.850.000	4 dokumen	113.135.000	4 dokumen	124.448.500	4 dokumen	518.933.500	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi		1100 konten	139.987.000	1500 konten	260.000.000	1600 konten	286.000.000	1700 konten	314.600.000	1800 konten	346.060.000	2000 konten	380.666.000	2200 konten	1.727.313.000	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten		6740 sebaran	213.212.900	7000 sebaran	270.000.000	7100 sebaran	297.000.000	7200 sebaran	326.700.000	7300 sebaran	359.370.000	7400 sebaran	395.307.000	7500 sebaran	1.861.589.900	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload		150 Dokumen	35.508.300	200 dokumen	95.000.000	230 dokumen	104.500.000	250 dokumen	114.950.000	270 dokumen	126.445.000	300 dokumen	139.089.500	320 dokumen	615.492.800	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Selatan, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Badau, Semitau, Silat Hulu	
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan Pemda				7 media	500.000.000	10 media	750.000.000	7 media	750.000.000	7 media	750.000.000	7 media	750.000.000	7 media	3.500.000.000	Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2,16,03	PROGRAM APLIKAS INFORMATIKA	Presentase Total bobot domain evaluasi SPBE			345.397.770		7.575.000.000		7.673.000.000		8.401.650.000		10.420.115.000		10.266.126.500		44.681.289.270	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussiba u Utara, Putussiba u Kota		
		2,16,03,2,01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Nama domain yg telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kapuas hulu			114.530.070		1.395.000.000		2.300.000.000		1.687.000.000		2.205.000.000		1.225.000.000		8.926.530.070	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota		
		2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa		10 Domain	24.586.500	15 Domain	75.000.000	20 Domain	850.000.000	25 Domain	95.000.000	30 Domain	105.000.000	35 Domain	115.000.000	35 Domain	1.264.586.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota		
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		56 Domain dan sub Domain	89.943.570	77 Domain dan Subdomain	120.000.000	80 Domain dan Sub Domain	130.000.000	83 Domain dan Sub Domain	140.000.000	85 Domain dan Subdomain	150.000.000	88 Domain dan Subdomain	160.000.000	88 Domain dan Subdomain	789.943.570	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota		
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintahan kabupaten kapuas Hulu		-	-	13 Lokasi	1.200.000.000	9 Lokasi	1.320.000.000	11 Lokasi	1.452.000.000	16 Lokasi	1.950.000.000	5 Lokasi	950.000.000	44 Lokasi	6.872.000.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah Kab. Kapuas Hulu			230.867.700		6.180.000.000		5.373.000.000		6.714.650.000		8.215.115.000		9.041.126.500		35.754.759.200	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu		26 OPD	52.435.500	26 OPD	165.000.000	26 OPD	181.500.000	26 OPD	199.650.000	26 OPD	219.615.000	26 OPD	241.576.500	26 OPD	1.059.777.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota	
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu		-	-	1 Dokumen	265.000.000	1 Dokumen	291.500.000	2 Dokumen	560.000.000	2 Dokumen	616.000.000	2 Dokumen	677.600.000	8 Dokumen	2.410.100.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota	
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Presentase Pusat Data Center Kabupaten Kapuas Hulu		-	-	60%	850.000.000	70%	935.000.000	80%	1.028.500.000	90%	1.131.350.000	100%	1.244.485.000	100%	5.189.335.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota	
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Akses Internet		1 Lokasi	20.529.600	14 Lokasi	850.000.000	23	1.450.000.000	34	2.160.000.000	50	3.205.000.000	55	3.530.000.000	54	11.215.529.600	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		-	-	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	495.000.000	2 Dokumen	544.500.000	2 Dokumen	598.950.000	2 Dokumen	658.845.000	10 Dokumen	2.747.295.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		-	-	2 Dokumen	425.000.000	2 Dokumen	467.500.000	2 Dokumen	514.250.000	2 Dokumen	565.675.000	2 Dokumen	622.242.500	10 Dokumen	2.594.667.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu		3 Aplikasi	105.946.900	5 Aplikasi	235.000.000	5 Aplikasi	258.500.000	5 Aplikasi	284.350.000	4 Aplikasi	312.785.000	4 Aplikasi	344.063.500	25 Aplikasi	1.540.645.400	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Integrasi Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu		-	-	2 Layanan	145.000.000	2 Layanan	159.500.000	2 Layanan	175.450.000	2 Layanan	192.995.000	2 Layanan	212.294.500	10 Layanan	885.239.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		216.03.2.02.09		Jumlah implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Ekosistem Smart City Kabupaten Kapuas Hulu		-	-	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	385.000.000	2 Kegiatan	423.500.000	2 Kegiatan	465.850.000	2 Kegiatan	512.435.000	10 Kegiatan	2.136.785.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Fasilitas Command Center Kapuas Hulu		-	-	1 Kegiatan	1.900.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	165.000.000	1 Kegiatan	181.500.000	1 Kegiatan	199.650.000	5 Kegiatan	2.596.150.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
				Jumlah monitoring dan fasilitasi usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet)		23 Lokasi	51.955.700	23 Lokasi	145.000.000	23 Lokasi	159.500.000	23 Lokasi	175.450.000	23 Lokasi	192.995.000	23 Lokasi	212.294.500	115 Lokasi	937.195.200	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK	-	-	-	2 Kegiatan	245.000.000	2 Kegiatan	269.500.000	2 Kegiatan	296.450.000	2 Kegiatan	326.095.000	2 Kegiatan	358.704.500	10 Kegiatan	1.495.749.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Information (GCIO)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kab. Kapuas Hulu		-	-	1 Kegiatan	155.000.000	1 Kegiatan	170.500.000	1 Kegiatan	187.550.000	1 Kegiatan	206.305.000	1 Kegiatan	226.935.500	5 Kegiatan	946.290.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.20,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				215.663.180		870.000.000		792.000.000		1.036.200.000		958.320.000		1.235.652.000		5.107.835.180	Bidang Statistik dan Aptika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2,20,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Kompilasi data statistik sektoral yang dilakukan			215.663.180		870.000.000		792.000.000		1.036.200.000		958.320.000		1.235.652.000		5.107.835.180	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.20.02.2.01,	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD yang menggunakan data ststistik Sektoral dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			215.663.180		870.000.000		792.000.000		1.036.200.000		958.320.000		1.235.652.000		5.107.835.180	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu		1 Dokumen	167.848.180	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	302.500.000	1 Dokumen	332.750.000	1 Dokumen	366.025.000	6 Dokumen	1.694.123.180	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM berkualitas untuk peningkatan mutu statistik daerah		-	-	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	165.000.000	1 Kegiatan	181.500.000	1 Kegiatan	199.650.000	1 Kegiatan	219.615.000	5 Kegiatan	915.765.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral		1 Dokumen	47.815.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000	1 Dokumen	175.692.000	6 Dokumen	780.427.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Forum Statistik Sektoral				1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	121.000.000	1 Kegiatan	133.100.000	1 Kegiatan	146.410.000	5 Kegiatan	610.510.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sarana dan Prasarana pengembangan statistik sektoral				1 Aplikasi	150.000.000	-	-	1 Aplikasi	165.000.000	-	-	1 Aplikasi	181.500.000	3 Aplikasi	496.500.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral				1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	121.000.000	1 Kegiatan	133.100.000	1 Kegiatan	146.410.000	5 Kegiatan	610.510.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				218.855.300		2.107.500.000		2.318.250.000		2.550.075.000		2.339.232.500		2.573.155.750		7.268.079.800	Bidang Statistik dan Aptika		
		2.21.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Predikat KAMI Kabupaten Kapuas Hulu			218.855.300		2.107.500.000		2.318.250.000		2.550.075.000		2.339.232.500		2.573.155.750		7.268.079.800	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Sterilisasi Tempat Strategis (Ruangan Kerja Pimpinan)			60.522.300		1.612.500.000		1.773.750.000		1.951.125.000		1.680.387.500		1.848.426.250		5.465.784.800	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Putussiba u Utara, Putussiba u Kota
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	60.522.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	60.522.300	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Kelembagaan Urusan Persandian		-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	385.000.000	2 Dokumen	423.500.000	-	-	-	-	4 Dokumen	808.500.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dengan Kompetensi Bidang Kemanan Infromasi Berbasis TIK		-	-	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	148.500.000	1 Kegiatan	163.350.000	1 Kegiatan	179.685.000	1 Kegiatan	197.653.500	5 Kegiatan	491.535.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
				Jumlah Forum Komunikasi Persandian Daerah yang Partisipatif		-	-	1 Kegiatan	137.500.000	1 Kegiatan	151.250.000	1 Kegiatan	166.375.000	1 Kegiatan	183.012.500	1 Kegiatan	201.313.750	5 Kegiatan	500.637.500	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		-	-	1 Kegiatan	165.000.000	1 Kegiatan	181.500.000	1 Kegiatan	199.650.000	1 Kegiatan	219.615.000	1 Kegiatan	241.576.500	5 Kegiatan	600.765.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
				Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Secara Komprehensif		-	-	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	220.000.000	1 Kegiatan	242.000.000	1 Kegiatan	266.200.000	1 Kegiatan	292.820.000	5 Kegiatan	728.200.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota
				Jumlah Pengembangan Layanan Keamanan Informasi yang Berorientasi Pada Kebutuhan Pengguna		-	-	1 Layanan	195.000.000	1 Layanan	214.500.000	1 Layanan	235.950.000	1 Layanan	259.545.000	1 Layanan	285.499.500	5 Layanan	709.995.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussib au Utara, Putussib au Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Teknologi Kemanan Informasi yang Andal				1 Kegiatan	255.000.000	1 Kegiatan	280.500.000	1 Kegiatan	308.550.000	1 Kegiatan	339.405.000	1 Kegiatan	373.345.500	5 Kegiatan	928.455.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Putussibau Utara, Putussibau Kota
				Jumlah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu				1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	192.500.000	1 Kegiatan	211.750.000	1 Kegiatan	232.925.000	1 Kegiatan	256.217.500	5 Kegiatan	637.175.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02,2,02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			158.333.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000		724.729.500		1.802.295.000	Bidang Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Telekomunikasi Daerah		23 Kecamatan	158.333.000	23 Kecamatan	300.000.000	23 Kecamatan	330.000.000	23 Kecamatan	363.000.000	23 Kecamatan	399.300.000	23 Kecamatan	439.230.000	23 Kecamatan	1.092.300.000	Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
				Jumlah Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Audit Kemanan Infromasi		-	-	49 OPD	195.000.000	49 OPD	214.500.000	49 OPD	235.950.000	49 OPD	259.545.000	49 OPD	285.499.500	49 OPD	709.995.000	Statistik dan Aptika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TOTAL							4.569.315.456		26.714.106.383		28.211.017.021		31.083.468.723		34.647.765.595		37.023.042.155		157.409.726.582			

Catatan:
1. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dialihkan ke Dinas Cipta Karya Kab. Kapuas Hulu

Putussibau, Agustus 2021

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

[Signature]
Ir. **ISTIWA, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006

ANALISIS SWOT PADA RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

Analisis SWOT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu organisasi atau satuan kerja dan mengembangkan perencanaan strategis. Analisis SWOT menilai faktor internal dan eksternal, serta potensi saat ini dan masa depan.

Secara sederhana, analisis SWOT adalah metode strategi perencanaan dengan mengukur 4 komponen penting, berupa Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang kemudian disingkat SWOT. Keempat elemen inilah yang harus diuraikan untuk mendapatkan hasil yang lengkap guna mencapai penyelesaian masalah yang efektif.

Tujuan utama dari menggunakan analisis SWOT adalah untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis serta menetapkan strategi bisnis.

Berikut adalah analisis SWOT untuk rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

A. Analisis Faktor Lingkungan Internal Faktor-faktor lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), sebagai berikut.

1. Kekuatan (Strength). Kekuatan (Strength) merupakan kemampuan yang bersifat positif yang terdapat di dalam lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :
 - a. Adanya tujuan organisasi Diskominfo yang jelas dan terarah sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
 - b. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
 - c. Potensi sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya atau aparatur yang tinggi.
 - d. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal selaras dengan urusan pemerintahan dan tugas yang diampu.
 - e. Kemitraan Strategis berupa Kerjasama dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk pengembangan program..
2. Kelemahan (Weakness). Kelemahan merupakan kondisi atau keadaan yang bersifat negatif yang terdapat di dalam lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, yang dapat menimbulkan kendala, permasalahan dan/atau hambatan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang, meliputi:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan informasi, komunikasi dan statistik.
- b. Belum optimalnya ketersediaan aplikasi, sistem dan pengintegrasian jaringan informasi, komunikasi dan statistik;
- c. Kompetensi SDM relatif belum memadai dan Ketidaksesuaian atau latar belakang pendidikan dengan bidang tugas di bidang komunikasi, informatika dan statistik
- d. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang informasi, komunikasi dan statistik.
- e. Keterbatasan dalam Penyampaian Informasi: Masih ada daerah yang kurang terjangkau oleh layanan informasi dan komunikasi.

Analisis Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat), sebagai berikut:

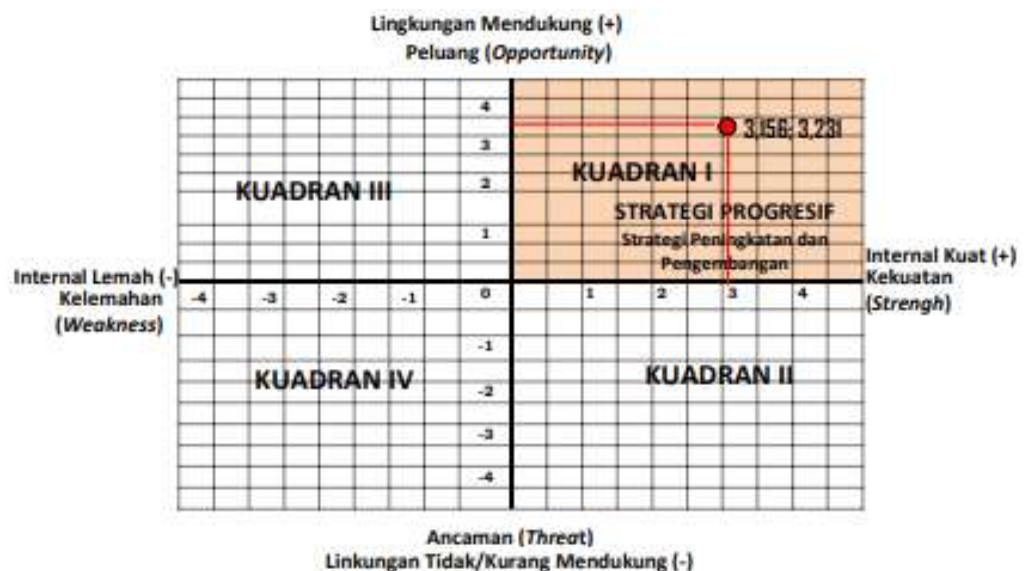
1. Peluang (Opportunity). Peluang merupakan suatu kondisi yang bersifat terbuka dan tersedia yang bersifat positif yang terdapat di dalam lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat dimanfaatkan melalui suatu usaha dan upaya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan, meliputi :
 - a. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan lembaga/institusi dan stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - c. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang informasi, komunikasi dan statistik.
 - d. Pertumbuhan Teknologi Informasi: Meningkatnya adopsi teknologi digital di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk program-program baru.
 - e. Keberadaan ilmu dan teknologi di bidang informasi, komunikasi dan statistik yang terus berkembang.
 - f. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - g. Meningkatnya Kesadaran akan Data dan Statistik: Masyarakat semakin menyadari pentingnya data untuk pengambilan keputusan.
2. Ancaman (Threat). Ancaman (threat) merupakan kondisi atau keadaan yang bersifat negatif yang terdapat di dalam lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, yang dapat menimbulkan kendala, permasalahan dan/atau hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan, meliputi :
 - a. Kegiatan dan aktifitas informasi dan komunikasi bersifat maya yang pengawasan dan pengendalian relatif kompleks.

- b. Perubahan Teknologi yang Cepat: Harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.
- c. Kesulitan dilakukannya penataan lokasi menara/tower telekomunikasi dari awal sebagai akibat belum tersedianya masterplan yang jelas.
- d. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan.
- e. Isu Keamanan Data: Ancaman terhadap keamanan data dan privasi informasi yang dapat merusak kepercayaan Masyarakat.
- f. Regulasi yang Berubah: Perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi dan rencana strategis.

B. Analisis SWOT.

Untuk mengetahui strategi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan model Analisis SWOT, melalui tahapan, sebagai berikut: Penetapan Strategi Organisasi Hasil proses pembobotan dan penetapan rating untuk Faktor Lingkungan Internal dan untuk Faktor Lingkungan Eksternal selanjutnya dilakukan penetapan strategi organisasi, sebagai berikut :

1. Matrix Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis (Strategic Position and Action Evaluation-SPACE Matrix). Melalui langkah-langkah penetapan posisi pada Matriks Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis (Strategic Position and Action Evaluation-SPACE Matrix), diperoleh posisi angka sebagaimana yang digambar didalam pada Bagan 1 berikut:



Gambar 1. Matrik SPACE Strategi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu

Pada Bagan 1 diatas menunjukkan bahwa posisi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu berada pada DIAGRAM I, yakni STRATEGI PROGRESIF, yang berarti posisi yang sangat paling menguntungkan, yaitu mendukung kebijakan Peningkatan/

Pengembangan (Pertumbuhan), yang maknanya bahwa Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan.

2. Matriks SWOT

Untuk mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh terhadap strategi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan, yang posisinya berda dalam Diagram 1 (Strategi Progresif) menggunakan model atau Matriks SWOT, seperti pada Bagan 2 berikut:

EFAS	IFAS	Kekuatan/ <i>Strength</i> (S) (Faktor-faktor Kekuatan Internal)	Kelemahan/ <i>Weakness</i> (W) (Faktor-faktor Kelemahan Internal)
Peluang/ <i>Opportunity</i> (O) (Faktor-faktor Peluang Eksternal)		STRATEGI S-O Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman/ <i>Threats</i> (T) (Faktor-faktor Ancaman Eksternal)		STRATEGI S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 2. Matriks SWOT Strategi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu

IFAS (internal strategic factory analysis summary) dengan kata lain faktor-faktor strategis internal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal dalam kerangka kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

Sedangkan EFAS (eksternal strategic factory analysis summary) dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Penjelasan matriks SWOT diatas, yakni:

- Strategi S-O (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi S-T (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi W-O (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi W-T (Weakness and Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dalam analisis SWOT pada matrik Faktor Strategi Eksternal (EFS) dan Faktor Strategi Internal (IFS). Dari analisis matrik faktor strategi tersebut dapat diketahui faktor-faktor strategis yang ada di Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi pertimbangan dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu berada pada Strategi S-O (Strength dan Opportunities) sebagaimana yang termuat dalam Matriks SWOT pada Bagan 3 berikut.:

<p>Faktor Internal (IFAS)</p> <p>Faktor Eksternal (EFAS)</p>	<p>KEKUATAN / Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tujuan organisasi Diskominfo yang jelas dan terarah sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah 2. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clane government). 3. Potensi sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya atau aparatur yang tinggi. 4. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal selaras dengan urusan pemerintahan dan tugas yang diampu. 5. Kemitraan Strategis berupa Kerjasama dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk pengembangan program. 	<p>KELEMAHAN/ Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tujuan organisasi Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan informasi, komunikasi dan statistik. 2. Belum optimalnya ketersediaan aplikasi, sistem dan pengintegrasian jaringan informasi, komunikasi dan statistik; 3. Kompetensi SDM relatif belum memadai dan Ketidaksesuaian atau latar belakang pendidikan dengan bidang tugas dibidang komunikasi, informatika dan statistik 4. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang informasi, komunikasi dan statistik. 5. Keterbatasan dalam Penyampaian Informasi: Masih ada daerah yang kurang terjangkau oleh layanan informasi dan komunikasi.
<p>PELUANG/ Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 2. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan lembaga/institusi dan stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 3. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang informasi, komunikasi dan statistik. 4. Pertumbuhan Teknologi Informasi: Meningkatnya adopsi teknologi digital di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk program-program baru. 5. Keberadaan ilmu dan teknologi dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang terus berkembang. 6. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; 7. Meningkatnya Kesadaran akan Data dan Statistik: Masyarakat semakin menyadari pentingnya data untuk pengambilan keputusan. 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi SDM/Aparatur dengan pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Diklat 2. Hubungan yang baik di lingkungan dan luar Pemkab Kapuas Hulu/ Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clane government). 3. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi/ Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal selaras dengan urusan pemerintahan dan tugas yang diampu 	<p>Strategi W-O</p>

ANCAMAN/ Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dan aktifitas informasi dan komunikasi bersifat maya yang pengawasan dan pengendalian relatif kompleks. 2. Perubahan Teknologi yang Cepat: Harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. 3. Kesulitan dilakukannya penataan lokasi menara/tower telekomunikasi dari awal sebagai akibat belum tersedianya masterplan yang jelas. 4. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan. 5. Isu Keamanan Data: Ancaman terhadap keamanan data dan privasi informasi yang dapat merusak kepercayaan Masyarakat. 6. Regulasi yang Berubah: Perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi dan rencana strategis. 		

Pada Bagan 3 Strategi Matrix SWOT atau Internal Faktor Strategi/Eksternal Faktor Strategi (IFS/EFS), Strategi Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu berada pada Strategi S-O (Strength dan Opportunities), dengan pengertian bahwa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedapat menggunakan kekuatan yang dimiliki yang ada dalam Lingkungan Internal untuk memanfaatkan sebesar-besarnya peluang-peluang yang ada di dalam Lingkungan Eksternal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni :

- a. Pengakuan eksistensi dan integritas yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Adanya visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
- c. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
- d. Potensi sumber daya manusia atau aparat yang tinggi.
- e. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal.
- f. Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.
- g. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- h. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan lembaga/institusi dan stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- i. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang informasi, komunikasi dan statistik.
- j. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang informasi, komunikasi dan statistik.

- k. Ketersediaan SDM tamatan tamatan dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang dapat direkrut.
- l. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan swasta dan lembaga lainnya.
- m. Keberadaan ilmu dan teknologi dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang terus berkembang.
- n. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- o. Adanya peluang investasi dibidang informasi dan komunikasi karena adanya potensi sumber daya Kabupaten Kapuas Hulu.
- p. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pasar dibidang informasi dan komunikasi.

Dari hasil penetapan strategi, yakni STRATEGI PROGRESIF, yaitu mendukung kebijakan peningkatan/pengembangan (pertumbuhan), maka strategi yang dijalankan Diskominfo untuk mencapai tujuan melalui penetapan **Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)**, yakni :

FPK I : Pemanfaatan potensi sumber daya manusia (aparatur) yang dimiliki dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui :

- a. Pengembangan sistem pengelolaan data dan administrasi SKPD yang baik dan benar.
- b. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Pengembangan motivasi, dedikasi dan profesionalitas SDM/Aparatur.

FPK II : Tanggung jawab dan komitmen penetapan visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sebagai modal peningkatan layanan kepada masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan layanan usaha jasa dan infrastruktur dibidang informasi dan komunikasi.
- b. Mengembangkan pemahaman, wawasan dan kemampuan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan persandian Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyebarluasan informasi.
- e. Peningkatan lembaga pengelola informasi daerah.
- f. Peningkatan lembaga dan kelompok informasi masyarakat.
- g. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok informasi masyarakat.

FPK III : Peningkatan Daya Saing Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui:

- a. Pengembangan eksistensi Pusat Data, Informasi dan Statistik Daerah.
- b. Pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan data, informasi dan statistik daerah.
- c. Pengembangan perangkat lunak, sistem dan manajemen pengelolaan database daerah.
- d. Pengembangan aplikasi dan sistem dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Pengembangan dan pengintegrasian jaringan informasi dan komunikasi lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
- f. Pengembangan standarisasi perangkat informasi dan komunikasi untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

FPK IV : Peningkatan koordinasi dan kerjasama didalam lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui:

- a. Terjalannya kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka percepatan pengembangan bidang informasi, komunikasi dan statistik.
- b. Mendorong partisipasi kelembagaan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat mengenai pemanfaatan media informasi dan komunikasi.